

**TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum

Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam

pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

AGUSMAN HIDAYAT

NIM:10300111005

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agusman Hidayat
NIM : 10300111005
Tempat/tgl. Lahir : Balangnipa 31-08-1993
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Modern Estate blok HE No. 3
Judul : Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 07 September 2016

Penyusun,


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R
Agusman Hidayat
NIM: 10300111005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam”, yang disusun oleh AGUSMAN HIDAYAT, NIM: 10300111005, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari jum’at, 16 juni 2017 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 12 Juli 2017

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag (.....)

Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum. (.....)

Munaqisy I : Dra. Nila Sastrawati, M.Si. (.....)


Munaqisy II : Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi. (.....)

Pembimbing II : Dr. Kurniati, S.Ag. M.Ag. (.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Terima kasih tak cukup untuk keselamatan dan kesehatan yang diberikan oleh Sang Pemilik Segalanya. Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, dapat dapat merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu, sembari berserah diri dalam kerendahan hati dan kenistaan diri sebagai seorang hamba, maka sepantasnyalah puji syukur hanya diperuntukan kepada Sang Maha Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., suri tauladan seluruh umat manusia, penyusun kirimkan shalawat dan salam kepada beliau serta para sahabat yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup.

Sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan Allah swt. yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain, maka tepatlah bila menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sederatan hamba Allah swt. yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan, kiranya dicatat oleh Allah swt. sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Ramling dan Ibunda Satriani, semoga Allah swt. melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. Sebagaimana dia mendidik penyusun semenjak kecil, yang atas asuhan, limpahan kasih sayang serta dorongan dari keduanya, penyusun selalu memperoleh kekuatan materil dan moril dalam mendapati pencarian hakikat diri.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan seluruh pembantu dekan.
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Kurniati, S.Ag, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, dan saran, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan.
4. Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi, dan Dr. Kurniati, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh dedikasi, keiklasan, dan kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan-masukan keilmuan yang sangat berharga hingga saat selesainya penyusun skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang pernah mengajar dan membimbing. Permohonan maaf apabila ada perbuatan, ucapan serta tingkah laku yang tidak sepatutnya pernah penulis lakukan.

6. Ibu Kepala perpustakaan beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Saudara-saudari senasib seperjuangan jurusan HPK angkatan 2011, terima kasih atas kebersamaannya, bertemu, berkenalan, lalu bersahabat dengan teman-teman semua adalah sebuah pengalaman hidup yang sangat berharga.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb

Makassar, 07 September 2016

Penyusun,



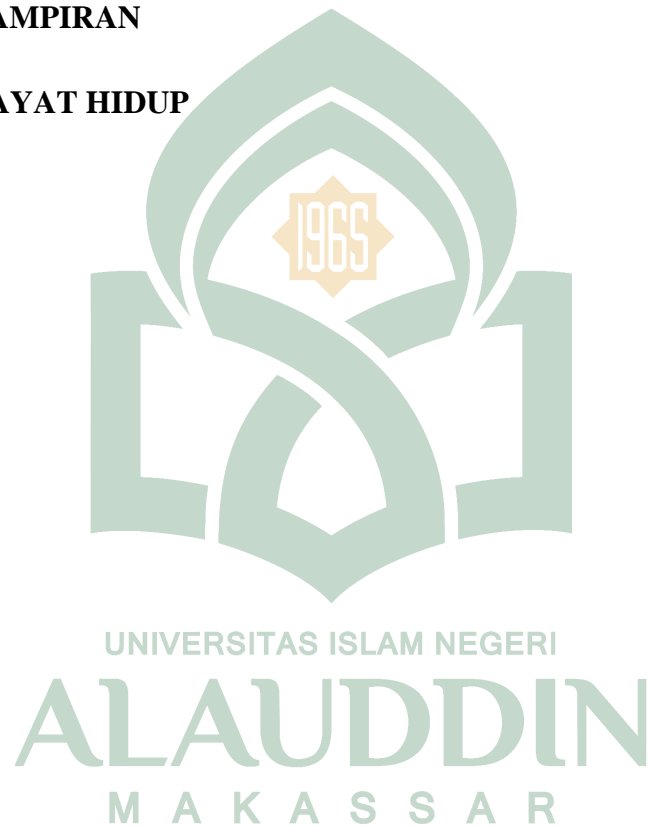
Agusman Hidayat
NIM: 10300111005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v-vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii-xiv
ABSTRAK	xv-xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-17
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pengertian Judul.....	9
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	18-34
A. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam	18
B. Perempuan dan Problematika Perkembangan Hukum Islam	27
BAB III KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	35-56
A. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan.....	35
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	40
C. Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan.....	51
BAB IV PERAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN	
TERHADAP PEREMPUAN.....	57-75
A. Pertanggung Jawaban Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Hukum Islam.....	48

B. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Tafsir Keagamaan	64
BAB V PENUTUP	76-77
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	78-80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengantitik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet(dengantitik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	S	Es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengantitik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	apostroferbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathahdanya</i>	ai	a dan i
اَو	<i>fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> <i>tau</i> ya	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah</i> dan <i>w</i> <i>au</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

: *mata*

: *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

: *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

: *al-haqq*

: *al-hajj*

: *nu“ima*

: *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh: : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

: *al-falsafah*

: *al-biladu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: : *ta'muru>na*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fi Zilal al-Qur'an*

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *dinullah* *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadunillarasul

Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'a>n

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu>

(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

KUHP = Kita Undang-Undang Hukum Pidana

UUD = Undang-Undang Dasar

HAM = Hak Asasi Manusia

swt. = Subhanau wa ta'ala

saw. = Sallallahu 'alaihi wa sallam

QS.../..... = Qur'an Surah

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

=

=

= صلى الله عليه وسلم

=

=

=

الى اخرها\

=



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Agusman Hidayat
Nim : 10300111005
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, 2) Mengemukakan peran hukum Islam mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Dalam menjawab masalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis, sosiologis dan teologis normatif. Penelitian tersebut tergolong library research (kepastakaan), data yang dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya.

Dari hasil penelitian terdapat fakta dalam hal ini hal-hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena dominasi kaum laki-laki yang berkiprah dalam sektor publik. Serta peran perempuan hanya sampai pada ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurus segala kebutuhan anak-anak dan suaminya. Penulis menemukan, dari segi penafsiran para ulama mengenai kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, telah terjadi diskriminasi karena para penafsir tersebut adalah laki-laki sehingga sudah jelas ruang yang diberikan kepada

kaum perempuan lebih sempit, dan sudah pasti kaum laki-laki lebih mengedepankan kedudukannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diharapkan adanya penafsiran ulang mengenai kedudukan perempuan baik dalam sektor domestik maupun publik, serta pemberian sanksi yang setimpal kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan, agar memberikan efek jera kepada pelaku tersebut. Dalam agama Islam pun menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan hanyalah ketakwaan kaum tersebut.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah mencatat bahwa perempuan selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam relasinya dengan laki-laki. Mereka hanya dijadikan sebagai pelengkap dan bahkan menjadi korban, dianggap makhluk Tuhan kelas dua (*second class*) dan sering dianggap budak. Kalangan elit bangsa Yunani kuno, misalnya, perempuan ditempatkan sebagai makhluk tahanan yang disekap di istana. Kalangan bawahnya pun memperlakukan perempuan sebagai barang dagangan yang bisa diperjual belikan. Bila sudah menikah, para suami berkuasa penuh terhadap istrinya. Peradaban Romawi menempatkan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan suami sangat mutlak, kewenangan untuk menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh.¹

Fakta pahit tersebut terus berlangsung sampai abad ke 6 Masehi. Hampir setiap tempat dan waktu mengisyaratkan demikian. Masyarakat Pra-abad ke 7 Masehi sering menjadikan perempuan sebagai sesajen bagi para Dewa. Hak hidup perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, istri harus dibakar hidup-hidup pada saat suami dibakar. Sedangkan dalam masyarakat Cina terdapat petuah-petuah kuno yang dianggap memanusiaikan perempuan. Ajaran yahudi menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena ia yang menyebabkan Adam terusir dari

¹Amiruddin Arani, *Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda (Cet. I; Jakarta: Rahima, 2002), h. 103.

surga. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak memiliki anak laki-laki. Dalam tradisi Nasrani pun nasib perempuan sangat menyedihkan. Dalam Konsili yang diadakan pada Abad ke 5 masehi dinyatakan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki. Dalam tradisi Arab Jahiliyah menghalalkan dibunuhnya seorang bayi karena ia terlahir sebagai perempuan.²

Hal tersebut menggambarkan betapa perempuan selalu menjadi korban kekerasan. Secara umum, kekerasan terhadap perempuan bisa diklasifikasikan kedalam 3 bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat lain. Bentuk kekerasan kepada perempuan antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.³

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang, berbeda dengan kekerasan ekonomi yang membentuk suami mengotrol hak keuangan istri, memaksa atau melarang istri bekerja

²Amiruddin Arani, *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, h. 103.

³Abdul Rahman, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi* (Makassar, Alauddin Universitypress, 2012), h. 37.

untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta tidak memberi uang belanja, memakai dan menghabiskan uang istri.⁴

Dalam deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada bulan Desember 1993 dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong perempuan dalam posisi subordinat dibanding dengan laki-laki.⁵

Penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah budaya yang patriarkhis dan pandangan agama yang bias gender yang tidak adil terhadap perempuan. Kekerasan yang berakar pada budaya dan kekerasan terakhir muncul karena penafsiran yang tidak adil terhadap perempuan dalam menganalisa ajaran-ajaran agama. Dalam kehidupan masyarakat, biasanya terjadi karena persetujuan antara keduanya yang kadang sulit diidentifikasi.

Dalam masyarakat muslim hal serupa tidak bisa dihindari, dianggap sesuatu yang alamiah bahkan oleh perempuan sendiri. Sampai saat ini kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi bahkan dari hari ke hari semakin meningkat, baik dari segi kualitas. Para pelakunya pun semakin beragam, mulai dari pemimpin di tempat

⁴Abdul Rahman, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*, h. 39.

⁵Nathalie Collaman, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan* (Cet. I; Jakarta: YLKI & The Ford Foundation, 1998), h. 8.

kerja, orang yang baru dikenal, tokoh agama, bahkan suami atau ayah yang menjadi keluarga terdekat.

Agama Islam menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh agama atau syari'at sebelumnya. Bahkan ajaran tersebut telah mendahului peradaban barat.⁶

Secara batinniah, Islam adalah agama keadilan dan anti kekerasan. Paling tidak, pesan demikian yang terlihat dari rumusan-rumusan para ulama mengenai tujuan mengapa agama diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia (*maqashid al-syari'ah*) di mana agenda utamanya adalah menekankan persoalan jaminan keadilan bagi kemaslahatan umat manusia. Misalnya Al-Syatibi menyatakan bahwa mengapa syari'ah diturunkan kepada manusia adalah karena menciptakan kemaslahatan yang isinya lima jenis perlindungan; perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, (kehidupan), harta, dan keturunan. Apabila dilihat dari tujuan syari'ah (*maqhasid al-syari'ah*) versi Al-Syatibi tersebut, maka unsur keadilan adalah hal yang paling menonjol dari ajaran Islam.⁷

Perkembangan agama-agama monoteis, struktur tersebut berubah. Para penafsir keagamaan semakin memperkuat struktur tersebut dengan mengangkat ayat-ayat suci sebagai legitimasi atau struktur tersebut. Budaya Arab yang patriarkhi banyak mempengaruhi para ulama Muslim dalam menafsirkan konsep-konsep agama Islam. Sebagaimana diakui, bahwa fikih Islam lahir sebagai formulasi hukum yang

⁶Din Wahid dan Jamhari Makruf, *Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan* (Cet. I; Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2007), h. 25.

⁷Din Wahid dan Jamhari Makruf, *Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan*, h. 28.

mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tertentu yang didasarkan pada al-Quran dan sunnah. Dapat juga dikatakan, bahwa fikih Islam merupakan perpaduan antara ajaran inti Islam dengan budaya lokal (tradisi).⁸

Hampir di sebagian besar masyarakat Muslim sekarang ini, masih memegang erat budaya patriarkhi. Kaum laki-laki dengan leluasa menguasai kaum perempuan dengan menempatkan mereka selalu berada dalam sektor domestik. Pengasingan perempuan di dalam rumah membuat ruang gerak mereka tidak mandiri secara ekonomis dan selanjutnya memiliki ketergantungan secara psikologis. Kalau membolehkan perempuan aktif di dunia publik, sistem patriarkhi ini selalu menekannya kepada kewajiban utama secara kodrati, yakni mengurus anak, suami, dan keluarga. Hal inilah yang banyak dibahas oleh Fatima Mernissi dalam salah satu karyanya ketika berbicara tentang masalah hijab. Dia menyimpulkan bahasanya bahwa budaya Hijab mengharuskan adanya pemisahan ruang gerak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa berkiprah di sektor domestik.⁹

Dalam al-Quran menjelaskan QS al-Hujurat/49:13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

⁸Martin van Bruinessen, *Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Cet. I; Bandung: Penerbitan Mizar, 1995), h. 176-182.

⁹Fatima Mernissi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, terjemahan oleh M. Masyhur Abadi (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997). h. 107-130.

Terjemahannya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁰

Ayat tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan secara substansial dan struktural antara laki-laki dan perempuan oleh karena itu tidak dapat dicari alasan untuk memojokkan perempuan atau mengistimewakan salah satu jenis kelamin manusia. Dalam ajaran agama Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi substansi penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya al-Quran dan Sunnah, menempatkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki. Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan gender dan tidak menghendaki ketidakadilan atau ketimpangan gender.

Jika nilai-nilai luhur al-Quran berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di masyarakat muslim, maka hal ini bukan disebabkan oleh Islam tetapi karena ajaran dan bimbingan Islam tidak diimplementasikan dalam tataran praktis.¹¹

Perempuan adalah makhluk yang “lemah” yang menjadi amanah dari Tuhan, karena itu harus dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 517.

¹¹Atho Mudzhar, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty Offset, 2007), h. 38.

asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945. Dalam konteks kehidupan sosial, istri berhak atas kelangsungan hidup serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, rasa aman harus diberikan kepada korban antara lain dengan memberdayakan dirinya agar berani mengamankan diri sendiri bila memang mendesak.¹²

Sistem hukum secara umum dapatlah diartikan sebagai kumpulan yang terdiri atas berbagai elemen, yakni norma, asas, konsep, teori-teori yang saling terkait satu sama lain dan pula saling mempengaruhi dalam suatu “kontruksi” hukum. Keterkaitan antara elemen itu disebabkan oleh adanya asas dan/atau beberapa asas, sedangkan saling mempengaruhi lebih disebabkan adanya perbedaan konsep antar elemen itu sendiri. Hukum dalam konsep kontinental berbeda dengan hukum dalam konsep *Anglo-saxon* dan bahkan perbedaan yang demikian dapat dilihat pula perbedaan konsep hukum adat maupun dalam konsep hukum Islam. Dalam proses Islamisasi di kepulauan Indonesia yang dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan, peranan hukum Islam sangat besar. Ini dapat dilihat dari kenyataan misalnya kalau seorang saudara muslim hendak menikah dengan seorang wanita pribumi maka wanita itu diIslamkan lebih dahulu dan pernikahannya kemudian dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam. Keluarga yang tumbuh dari perkawinan ini mengatur hubungan antara anggotanya dengan kaidah hukum Islam atau kaidah lama yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Kalau salah seorang

¹²Abdul Rahman, *Perempuan tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*, h. 52.

anggota keluarga itu meninggal dunia, harta peninggalannya dibagi menurut hukum kewarisan Islam.¹³

Dengan demikian, hukum Islam bukanlah sistem yang ajek dan hanya memiliki satu standar kebenaran yang berlaku sepanjang masa. Hukum Islam tumbuh dan berkembang melalui proses evolusi yang sangat panjang mulai dari tahun pertama kenabian hingga sekarang. Dengan kata lain, apa yang kita pahami dengan hukum Islam pada saat ini disadari atau tidak sebenarnya merupakan pembakuan dan pemberlakuan yang sebelumnya telah mengalami proses kritik dan dinamika sosio kultural tersendiri. Lebih menungkit lagi apa yang dikatakan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im: pertama hukum Islam itu bukanlah Islam itu sendiri, tetapi ia semata-mata hanya merupakan hasil implementasi para yuris terhadap sumber-sumber utama ajaran Islam (Al-quran dan al-Sunnah); dan kedua, apa yang kita anggap hukum Islam itu merupakan produk pemahaman manusia tentang sumber-sumber Islam dalam konteks sejarah sejak abad ketujuh sampai kesembilan. Selama periode tersebut menurut An-Na'im, para ahli hukum Islam telah menafsirkan al-Quran dan sumber-sumber lain dalam rangka mengembangkan suatu sistem syariah yang komprehensif dan kohoren sebagai petunjuk bagi kaum Muslim.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka pokok permasalahan dari karya tulis ini yaitu: Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai

¹³Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 114-116.

¹⁴Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), h. 26.

kekerasan terhadap perempuan? Dari pokok permasalahan tersebut dirumuskan sub permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan ?
2. Bagaimana peran hukum Islam mengenai kekerasan terhadap perempuan ?

C. Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefenisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yang dianggap penting.

a) Tindak kekerasan

Dalam kamus bahasa Indonesia, tindak kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai, serta dapat menimbulkan gangguan psikologis.

b) Perempuan

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa

perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya.

c) Hukum Islam

Secara etimologis maupun terminologis, istilah hukum Islam adalah mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat. Sumber utama hukum Islam adalah wahyu ilahi dan akal manusia. identitas ganda hukum Islam ini terlihat dalam dua penunjukan bahasa Arabnya, *Syari'ah* dan *Fiqh*. *Syari'ah* memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu ilahi, sedangkan *Fiqh* merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis *Syari'ah* yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: *Pertama*, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah *Syari'ah*. *Kedua*, ketentuan-ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguasaan akal. Bagian ini merupakan wilayah *Fiqh*.¹⁵

d) Perspektif

Perspektif merupakan cara pandang/wawasan seseorang dalam menilai masalah yang terjadi di sekitarnya, jadi perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu isu yang terjadi. Perspektif dapat

¹⁵Faturrahman Djail, *Filasafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999), h. 12.

dijadikan penambahan wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.¹⁶

Sedang pengertian dari judul penelitian yang dimaksud penulis adalah tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan dalam pandangan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Dengan memperhatikan tema yang diangkat, maka sumber data yang diperlukan berkenaan dengan buku-buku atau literature yang berbicara tentang masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan perspektif hukum Islam.

1. Abdul Rahman, S.Ag.,M.Pd buku yang berjudul *Perempuan tanpa Kekerasan dan Diskriminasi, Perspektif hukum Nasional, Internasional, dan hukum Islam*, buku ini membahas tentang: kekerasan yang korbannya adalah kaum perempuan yang timbul dari system sosial, politik, budaya, bahkan “agama”, serta gambaran diskriminasi dan kekerasan yang dialami perempuan. Mulai pandangan hukum Nasional dan hukum Islam berdasarkan dua pandangan tersebut, perempuan selalu mendapat perlindungan hukum yang bisa membuat kaum perempuan tidak merasa diintimidasi.
2. Imam Syaukani, S.Ag.,M.H. dalam bukunya *Rekontruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia* buku ini membahas tentang: perumusan ulang terhadap epistimologi hukum Islam klasik untuk menemukan sebuah metodologi

¹⁶Diperoleh dari laman <http://seputarpendidikan003.blogspot.co.id/2015/12/>. Diakses pada tanggal 11 maret 2016, pkl. 10:21.

pembaharuan hukum Islam Indonesia yang majemuk dalam kerangka sistem hukum nasional

3. Prof. Dr. H. Mustofa, S.H.,M.Si.,M.Hum. dan Drs. H. Abdul Wahid, S.H.,M.A. *Hukum Islam Kontemporer*. Membahas tentang sistem hukum Islam, dan pembaharuannya dalam penerapan hukum Islam di Indonesia serta kedudukan semua warganegara yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Di mana pada masa modern ini masyarakat sadar akan pentingnya HAM, menghargai pluralisme, dan bergerak memperjuangkan egaliterianisme dari segala sisi.
 4. Shanty Dellyana, SH. *Wanita dan anak di mata hukum*, membahas tentang pemasalahan wanita dan anak sebagai kaum yang umumnya dikatakan lemah sebagai masalah yang cukup penting, terutama mengenai hak-hak dan kewajibannya dan wanita sebagai warganegara dan anggota masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.
 5. Yayasan Obor Indonesia, *Hak Azasi Perempuan*, Membahas tentang Instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender dalam hal meningkatkan kepedulian dan penegakan hukum dalam masyarakat luas. Untuk meningkatkan kedudukan perempuan di Indonesia dengan mensosialisasikan materi Konvensi PBB yaitu Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- Mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum Islam, meskipun sesungguhnya ada yang membahas tentang kekerasan terhadap

perempuan dan pandangan hukum Islam namun tidak secara signifikan membahas kekerasan terhadap perempuan perspektif hukum Islam. Karena itu penulis ingin mengkaji masalah tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.¹⁷ Berdasarkan pemahaman tersebut, maka karya tulis ini disusun berdasarkan metodologi penelitian hukum Islam dengan menggunakan acuan yang telah digunakan oleh para peneliti sebelumnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Library Research* yang menjelaskan secara sistematis, normatif, dan akurat mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁷Diperoleh dari laman <http://rinawssuriyani.blogspot.com/2013/04/pengertian-metode-dan-metodologi.html>. Diakses pada tanggal 10 maret 2016, pkl. 22.09.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *analisis komparatif* yang umumnya didasarkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data primer maupun sekunder atas obyek-obyek yang hendak diteliti dan diuji.

3. Sumber Data

Data primer untuk hukum Islam dapat diperoleh dari karangan-karangan para pakar hukum Islam, baik tulisan pakar hukum di Indonesia maupun terjemahan dan tulisan dari pakar yang lain. Juga dari tulisan-tulisan lepas dari para pakar tersebut, data yang lain lewat media-media massa dan lainnya tentang perkembangan peristiwa menyangkut kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum Islam. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut:

1) Kutipan Langsung

Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan dari orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah redaksinya mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya.

2) Kutipan Tidak Langsung

Kutipan tidak langsung merupakan kutipan tidak menurut kata-kata, tetapi menurut pokok pikiran atau semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan bahasa sendiri. Penulis kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan dibedakan untuk kepentingan kejelasan.

4. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkain proses mengelola data yang diproses kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain:

- 1) *Identifikasi* data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan perspektif hukum Islam.
- 2) *Reduksi* data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh pembaca serta tidak berputar-putar dalam pembahasan suatu masalah.
- 3) *Editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menentukan pokok jawaban permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

b. Analisis Data

Tekhnik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan

yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

a) Tujuan umum yaitu:

Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam mengenai kekerasan terhadap perempuan.

b) Tujuan khusus antara lain sebagai berikut:

1) Untuk mendapat gambaran obyektif penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

2) Untuk mengetahui peran hukum Islam dalam kekerasan terhadap perempuan.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis

Adapun kegunaan penelitian ini lebih bersifat ilmiah, yaitu memberi sumbangsi pemikiran, baik berkenaan dengan pengembangan ilmu hukum secara umum, maupun ilmu ke Islaman secara khusus.

b. Secara praktis

Adapun kegunaan praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dalam pembentukan dan pembangunan hukum Islam di Indonesia pada masa-masa yang akan datang.





BAB II

PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam

Masalah kedudukan perempuan adalah masalah yang senantiasa hangat disepanjang zaman. Mengingat pentingnya masalah ini khususnya dari segi keadilan menurut ajaran hukum Islam, kemudian dari pada itu perlu lebih dahulu dinyatakan bahwa kedudukan perempuan pada pertengahan zaman di Eropa khususnya dan dibagian-bagian dunia lainnya sangat rendah, baik dalam hukum perdata, sosial, ekonomi, dan politik. Berhubungan dengan hal itu timbullah gerakan-gerakan perjuangan untuk hak-hak perempuan yang dimulai pada akhir abad ke 18 M.

Dalam UU HAM terdapat aturan khusus mengenai hak (pasal 45 s.d. 51). Dalam aturan khusus ini, secara umum memberikan hak kepada perempuan yang sama dengan hak yang ada pada kaum laki-laki diberbagai aspek. Perempuan mempunyai hak-hak politik, hak berprofesi (pasal 46), mempunyai hak menentukan kewarganegaraanya sendiri (pasal 47), berhak memperoleh pendidikan (pasal 48), berhak memperoleh perlindungan khusus atas fungsi reproduksi atau berketurunan (pasal 49), berhak melakukan perbuatan hukum sendiri jika ia telah dewasa atau telah menikah (pasal 50) dan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya dalam kehidupan rumah tangganya (pasal 51). Secara keseluruhan pasal-pasal tersebut telah mencerminkan pelaksanaan kemaslahatan menurut syariat.

UU HAM akan syariat Islam tentang perlunya wali bagi perempuan yang belum dewasa dan belum menikah. Meskipun tidak disebut secara tegas, tetapi dapat dipahami terbalik dari pasal 50 yang berbunyi: “wanita yang telah dewasa dan telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”. Secara *mukhalafah*, aturan itu dipahami bahwa wanita yang belum dewasa (belum baliqh) atau belum menikah, harus didampingi oleh walinya atau melalui walinya dalam melakukan perbuatan hukum.¹

Tetapi mengenai hak-hak perdata mereka seperti dalam hukum perkawinan dan perceraian, hukum kewarisan, masih merupakan perjuangan yang hebat. Adapun kedudukan perempuan dalam hukum Islam antara lain:

1. Dalam Hukum Perkawinan

Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini, perkawinan, nikah atau zawaj adalah suatu akad yang suci antara laki-laki dan perempuan, yang sah menurut hukum Islam. Menegenai hal ini, pada umumnya para ahli fiqh berpendapat bahwa tak seorang pun dapat memaksa seorang wanita dewasa dan waras untuk kawin tanpa persetujuan. Hal tersebut sangat penting, karena ini menyangkut soal kebebasan penuh seorang perempuan untuk terikat dalam sebuah perjanjian perkawinan. Karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai

¹Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya* (Cet. I; Makassar: Yayasan Al-Akham, 2003), h.116-117.

kebebasan penuh untuk mengatakan apakah mereka bersedia atau tidak.² Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab kabul, calon suami dan calon istri jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada dibawah umur maka untuk mereka dapat bertindak wali mereka yang sah. Untuk dapat melakukan ijab kabul disyaratkan harus waras dan sudah dewasa, sehingga mereka dapat mengerti dan menyadari sepenuhnya apa yang mereka perbuat. Menurut Abu Zahra ada tiga syarat sahnya perkawinan yaitu:

- a) Tidak boleh ada suatu perjanjian perkawinan yang menunjukkan, bahwa perkawinan itu hanya dimaksudkan untuk satu waktu yang terbatas.
- b) Perjanjian harus bersifat umum dan disiarkan.

Perkawinan yang dimaksudkan dalam syarat pertama, sahnya sebuah perkawinan adalah kawin mut'ah ialah perkawinan yang terbatas untuk suatu waktu tertentu, dengan syarat membayarkan suatu kepada istri yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Kawin mut'ah akhirnya dilarang oleh Rasulullah dan dengan demikian, para ahli fiqh memandang kawin mut'ah sebagai perkawinan yang tidak sah. Sementara itu syarat yang kedua mengharuskan adanya sifat umum dalam perjanjian perkawinan, dimaksudkan untuk menjaga

²Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 218.

dan memelihara ketertiban dalam masyarakat dengan demikian mencegah timbulnya perkawinan yang karena pertimbangan tertentu sehingga dirahasiakan. Perahasian suatu perkawinan tidak boleh karena hanya mendatangkan kerugian bagi pihak perempuan terutama menyangkut martabat pribadinya.

2. Dalam Hukum Perceraian

Perceraian dalam bahasa Indonesia yang dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Karena itu peraturan tentang perceraian dalam hukum Islam senantiasa mengandung pendidikan untuk tidak mempermudah perceraian. Perceraian hendaknya hanya dilakukan dalam suatu keadaan, dimana tidak ada solusi lain untuk memperbaiki rumah tangganya. Moral Islam menghendaki untuk menjadikan perkawinan yang berusia kekal dan abadi selama hidup, hanya kematian yang menjadi alasan pemisahan ikatan. Jenis tahapan talak yaitu talak pertama dan kedua adalah sebagai percobaan perceraian yang memberi kemungkinan dari kedua pihak bisa kembali rukun sebagai suami istri. Dalam istilah fikih dinamakan *rudju'* yang berarti kembali oleh karena itu talak pertama dan kedua dinamakan *thalaq radj'i*. Adapun talak ketiga dinamakan talak *ba'in* karena talak ketiga dianggap dan cukup membuktikan bahwa hubungan kedua suami istri tidak dapat diperbaiki lagi, karena sudah jatuh talak tiga yang dianggap mereka tidak dapat kembali lagi. Kecuali jika pernah menikah lagi

dengan orang lain. Hukum Islam masih mengenal beberapa perbuatan, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan yang mengakibatkan perceraian yaitu:

- a) Ila', ialah dimana suami menyatakan sumpah, bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya dan menahan nafsuhnya selama empat bulan atau lebih. Suami dibolehkan mencabut sumpah itu dengan memperbaharui kehidupan perkawinan setelah jangka waktu empat bulan itu belaku.
- b) Zhihar, ialah suami bersumpah bahwa istri itu baginya adalah punggung ibunya. Jika ia bermaksud mencabut pernyataannya itu, maka ia harus membayar uang tebusan atau melakukan puasa dalam jangka waktu tertentu, setelah sumpah diucapkan si istri berhak pergi ke pengadilan untuk mendapatkan perceraian dan mendapatkan kembali hak-hak perkawinannya jika suami menebus sumpahnya.
- c) Li'an, ialah perbuatan suami yang menuduh istrinya berzina tapi tidak bisa membuktikannya.

Dalam keadaan demikian, istri berhak mengajukan permintaan cerai kepada hakim. Kecuali suami mau mencabut kembali tuduhannya itu, maka ia harus bersumpah. Dalam hal ini ada beberapa bentuk perceraian dalam hukum Islam, yaitu :

- a) Suami yang menyatakan keputusan sebagai jatuhnya talak kepada istri.

- b) Istri berhak memutuskan sendiri, baik karena berdasarkan persetujuan terlebih dahulu atau karena dikuasakan, yakni talak tafwidh.
- c) Kedua belah pihak suami dan istri sepakat untuk bercerai, yakni chulu' dan mubara'ah.
- d) Atas permintaan istri dengan keputusan hakim.
- e) Atas permintaan istri dengan keputusan hakim karena sikap suami, yakni zhihar.
- f) Perkawinan bubar dengan sendirinya tanpa memerlukan proses hukum karena perbuatan suami, yakni Ila'.
- g) Perkawinan dinyatakan bubar oleh hakim, karena suami menuduh istri berzinah tanpa dapat dibuktikan, sedang istri menolak tuduhan itu dengan sumpah, yakni li'an.

Dengan demikian, dilihat dari segi hak-hak laki-laki dan perempuan dalam perceraian, bahwa hukum Islam menempatkan hak-hak laki-laki dan perempuan yang seimbang dan wajar.

3. Dalam Hukum Kewarisan

Mengenai kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan menurut ajaran Islam. Karena hukum kewarisan itu sendiri sebagai satu keseluruhan, pada hakikatnya adalah perwujudan dari pada perbaikan-perbaikan yang dibawa Islam dalam hal kedudukan perempuan. Perlu diketahui bahwa pada pra Islam, yang berhak mewarisi adalah anggota keluarga laki-laki (Ashabah),

sedang kaum perempuan dan sebagai anggota keluarga digaris ibu, tidak mempunyai hak untuk mewarisi. Kondisi tersebut terjadi di Arabia pra Islam saja. Dalam hukum kewarisan tidak semata-mata hanya berurusan dengan pembagian harta peninggalan saja, juga menyangkut hal-hal yang lebih dalam yakni sistem kekeluargaan masyarakat itu sendiri. Karena itu, untuk membahas hukum kewarisan, tidak terlepas dari peninjauan bentuk-bentuk kemasyarakatan dan sistem kekeluargaannya. Hak-hak perempuan dalam mewarisi harta keluarganya yaitu :

- a) Mewarisi harta dari keluarga sendiri.
- b) Mewarisi dari suaminya
- c) Mahar
- d) Tidak berkewajiban memberi nafkah, selama suami masih hidup.
- e) Sementara istri dapat memakai kekayaan suaminya selama ia masih hidup.
- f) Hak atas kebebasan yang sama untuk mengadakan perjanjian dalam perkawinan untuk memasukkan ketentuan yang mungkin bersifat khusus bagi persyaratan individual mereka.

Harta benda orang yang meninggal dibagi-bagi antara ahli waris setelah dikurangi dengan semua utang, termasuk juga ongkos penguburan, zakat yang belum dibayar dan ongkos untuk membayar perjalanan orang lain ke Makkah, jika yang meninggal tidak memenuhi kewajiban itu. Ajaran agama

Islam dalam hal juga memberikan hak waris kepada janda dan beberapa anggota keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu perempuan, ibu dan nenek pihak ibu, saudara perempuan saudara seibu, seapak atau seibu. Semua sudah ditetapkan pembagian antara laki-laki dan perempuan dalam al-Quran.³

Zaitunah Subhan menegaskan bahwa untuk reinterpretasi fikih, tujuan syariat lebih memungkinkan dijadikan sebagai landasan reinterpretasi fikih dari pada yang lainnya, karena memiliki dasar-dasar yang cukup kokoh. Tujuan syariat ini harusnya menjadi tulang punggung bagi pembentukan konsep hukum fikih dan semua wacana fikih yang terbentuk harus sesuai dengan tujuan awal ini. Perwujudan keadilan ini harus memperhatikan empat prinsip yakni keadilan, kesetaraan, musyawarah, atau demokrasi. Pada intinya adalah pentingnya mewujudkan kemaslahatan bersama baik laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat.⁴

Hukum Islam merupakan hukum yang sangat menekankan kemanusiaan. Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Maka ayat-ayat yang berhubungan dengan penerapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Hukum Islam menempatkan

³Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum* (Cet. I; Yogyakarta: libery, 1988), h. 184.

⁴Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilanya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.

dimensi pembinaan sosial sebagai salah satu sasaran penting dalam pembentukan kepribadian seorang muslim melalui pembelaan hukum.⁵

Syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau hikmah bagi kehidupan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syariat atau agama, dengan demikian setiap hal yang zalim tidak memberi rahmat, bukanlah hukum Islam. Jelas bahwa tujuan diturunkannya hukum Islam adalah untuk kebahagiaan, kesetaraan dan keselamatan ummat manusia sendiri. Salah satu indikasi dari tercapainya hal tersebut adalah terwujudnya keadilan dan kesetaraan antara seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi acuan penting dalam setiap perumusan hukum Islam, termaksud aturan-aturan hukum Islam mengenai kedudukan perempuan. Dengan senantiasa berpatik pada prinsip-prinsip tersebut, tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dapat tercapai. Kemaslahatan bersama dalam hal ini adalah kemaslahatan yang dapat menyentuh semua lapisan manusia tanpa membedakan suku, bangsa maupun jenis kelamin.⁶

⁵Fatuhramman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. h. 71.

⁶Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2012), h. 164-165.

B. Perempuan Dan Problematika Perkembangan Hukum Islam

Berbicara mengenai perempuan dalam perkembangan hukum Islam adalah wacana dalam perspektif hukum yang selalu mendapat sorotan dan kajian posisi dimana sering disalah artikan bahwa perempuan adalah bagian laki-laki atau manusia yang belum sempurna kejadiannya dan kemudian akhirnya dianggap kurang afdal, dibandingkan posisi laki-laki yang didalam sejarah kemanusiaan mendapat posisi puncak hingga kini.

Oleh karena itu kajian perempuan menjadi sebuah topik yang sepatutnya mendapat sambutan dan jawaban, sehingga dapat memberikan visi dan pandangan atau kajian ulang yang dapat memberikan dan menempatkan posisi perempuan terutama didepan hukum itu lebih bermakna. Salah satu bentuk upaya dan jawaban terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam ini adalah dengan melakukan reaktualisasi ajaran Islam. Reaktualisasi ajaran Islam, dalam suatu arti dapat dinyatakan sebagai upaya yang dapat didorong oleh penilaian terhadap keadaan agama yang ada dan kaum muslimin belum memuaskan, untuk mengali apa yang diyakini sebagai standar-standar Islam yang benar agar dapat dipedomani dalam beradaptasi dengan konteks masyarakat masa kini yang terus mengalami perubahan. Konsepsi ini mengimplikasikan bahwa penafsiran-penafsiran ajaran Islam yang ada sekarang berasal dari upaya mengadaptasi ajaran tersebut kedalam situasi masa

lampau. Karena itu, penafsiran tersebut sekarang telah terlampau berat dihipit oleh beban historis dan kultural.⁷

Semua agama terutama agama Islam dewasa ini, mendapat tatangan baru karena dianggap melanggar ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum perempuan. Misalnya saja hal yang selalu mengganggu adalah penggambaran tuhan seolah-olah laki-laki pada hampir semua agama, apakah konstruksi bahwa tuhan adalah laki-laki tersebut adalah ketentuan tuhan atau sejauh mana pandangan tersebut dipengaruhi oleh budaya bias gender patriarkhi.⁸

Tapi ternyata dalam realitas sosialnya bahkan dalam beberapa ketentuan normatif fikih sendiri, kesetaraan itu tampak samar-samar saja bahkan gelap sama sekali sebagai contoh didalam warisan dan kesaksian, misalnya perempuan dianggap separuh dari laki-laki. Dalam rumah tangga, nikah, talak dan rujuk, perempuan (istri) diletakkan sebagai obyek, sementara laki-laki (suami) sebagai subyeknya. Juga dalam kehidupan bersama, perempuan diletakkan dibawah dominasi dan kekuasaan laki-laki yang tidak berhak memegang kepemimpinan dirumah tangga, dimesjid ataupun dimasyarakat. Dan banyak bukti lain yang secara keseluruhan menunjukkan tidak adanya lagi kesetaraan antara keduanya semata-mata karena mereka adalah perempuan. Ada dua alasan sehingga keadaan ini langgeng dimasyarakat: *pertama*, karena prinsip-prinsip dasar tentang kesetaraan tadi harus dijabarkan bukan diruang

⁷Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: UUI Press Indonesia, 1999), h. 19.

⁸Mansur Fakih, *Posisi Kaum Perempuan Dalam Analisis Gender Islam Tinjauan* (Cet. I; Yogyakarta: YMI, 1999), h. 4.

hampa akan tetapi dalam konteks sosial historis tertentu. *Kedua*, bagaimana pun tidak bisa ditutup-tutupi adanya bias gender didalam penafsiran agama yang selama ini memang didominasi oleh kaum laki-laki.⁹

Dalam perspektif sejarah Islam hadir didunia Arab dalam kondisi yang penuh dengan kezaliman diberbagai sendi kehidupan, termaksud tradisi tidak memanusiakan perempuan. Dalam banyak hal, al-Quran melabrak tradisi Arab Jahiliyah, namun kadang kala labrakan itu terjadi secara frontal, dan penghapusan ketidakadilan itu secara spontan, namun kadang-kadang juga melalui perubahan secara gradual dan bertahap. Pada saat yang sama, Islam sudah berada di Madinah, dan banyak komunitas Yahudi yang hidup disitu, Islam juga bereaksi terhadap praktik masyarakat Yahudi yang memperlakukan perempuan secara tidak adil.¹⁰

Perempuan sepanjang sejarah adalah sangat jelas bahwa Islam mampu menghasilkan sebuah alternatif beradab dan hadir dengan aturan-aturan hukumannya sendiri yang aplikatif serta etika-etika sosial modern. Setelah beberapa dekade gerakan Islam menunjukkan kekuatan potensialnya dan membuktikan dirinya mampu mengatur sebuah negeri di era modern ini. Islam mengakui pentingnya fase kehidupan kaum perempuan karena mereka telah diamanati peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam kehidupannya serta pada setiap tahapan mereka dihargai dan dihormati atas apa yang telah dilakukannya. Mereka menyatakan Islam pada awalnya

⁹Masdar F.Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1997), h. 50-51.

¹⁰M. Imdadun Rahmat, *Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas* (Cet. III; Jakarta: Erlangga, 2003), h. 153.

telah membuktikan kepada mereka dengan model-model peranan perempuan teladan dan melapangkan sebuah jalan yang secara terhormat dapat dijejaki pada setiap tahapan.

Selama 23 tahun Islam melakukan tranformasi sosial besar-besaran. Contoh-contoh yang bisa ditemukan antara lain kebiasaan mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir karena dianggap akan menjadi beban ekonomi keluarga dalam sistem masyarakat nomadik ketika itu. Karena praktik ini sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan HAM, maka praktik tersebut langsung dihapuskan oleh Islam tanpa kompromi. Demikian juga, ketika sebelumnya perempuan dianggap tidak memiliki hak pilih, bahkan ketika perempuan sudah menjadi janda sekalipun, hak pilih ditentukan walinya, islam pun mengubahnya juga. Setelah keatangan Islam perempuan, baik yang sudah janda maupun yang masih gadis diberi hak pilih, dan wali tidak boleh mengatasnamakan dirinya sebagai perempuan tersebut dalam menentukan jodohnya.¹¹

Perempuan adalah mitra yang sejajar dalam sebuah pembagian kekuasaan yang dominan dan seimbang di antara dua gender, dasar-dasar bagi teori ini diseluruh terkandung dalam al-Quran dan teladan nabi Muhammad Saw. Serta para pemimpin perempuan yang hidup disekitarnya, bahkan ijtihad awal yang inovatif. Kehendak perempuan Muslim hari ini adalah melakukan revitalisasi nilai-nilai Islam yang didasarkan fikih modern, yang secara drastis memperlancar proses pengembangan

¹¹Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 167-168.

dalam suatu masyarakat global. Relasi antara dua gender harus dapat dipahami dalam pengertian prinsip maupun dalam menampilkan peran luar biasa dalam membebaskan manusia dari segala jenis penindasan, dan juga mampu menampilkan sebuah alternatif paling cangguh dan beradab sebagai solusi bagi problem-problem kemanusiaan kontemporer.¹²

Kebebasan perempuan dalam batas-batas tertentu yang diajarkan al-Qur'an, yaitu kebebasan yang terkendali dengan adanya kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangga. Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melainkan sebaliknya sebagai bentuk penghormatan Islam terhadap status perempuan sebagai anggota masyarakat atau istri yang harus dilindungi. Rumah tangga yang memposisikan suami sebagai suami terhadap istri sebagaimana yang telah diyakini ummat Islam umumnya, itu merupakan sebagai salah satu bentuk dominasi laki-laki untuk berbuat semaunya terhadap perempuan. Sebagai salah satu wujud dan kesewenang-wenangan itu adalah pemukulan yang sering dilakukan suami terhadap istri, yang hal itu sering dapat landasan teologis dan sumber ajaran Islam yang paling prinsip. Pada hal menurut mereka sebenarnya al-Qur'an tidak bermaksud memaksa-maksa itu terjadi karena adanya penafsiran mengenai ayat tertentu dengan bias laki-laki yang tentunya

¹²Ali Hoesin Hakeem, *Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama Membela* (Cet. I; Jakarta: AL-HUDA, 2005), h. 69-70.

memiliki kecenderungan tertentu demi kepentingan pribadi atau secara umum demi kelangsungan sistem masyarakat yang dominan dalam dunia Islam.¹³

Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pembaharuan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralisme sosial budaya maupun politik dalam sebuah masyarakat atau negara. Mencermati kondisi masyarakat Islam pada masa-masa awal yang melatar belakangi lahirnya mazhab-mazhab seperti Hijaz, Irak dan Syria, terlihat pengaruh elemen-elemen sosial budaya terhadap ulama untuk menentukan atau menemukan hukum Islam. Pengaruh sosial budaya terhadap pembentukan hukum Islam dengan keadaan sosial budaya disekitarnya.¹⁴

Pembaruan hukum Islam, khususnya yang terkait dengan kedudukan perempuan, ternyata sejak masa sebelum kemerdekaan telah muncul respon dari kaum perempuan secara pribadi maupun organisasi terhadap aturan-aturan hukum keluarga yang diberlakukan ketika itu. Secara perorangan dikenal Raden Ajeng Kartini (1879-1904 M), mengkritik keburukan-keburukan yang diakibatkan perkawinan dibawah umur, perkawinan paksa, poligami, dan talak sewenang-wenang dari suami.¹⁵

¹³Halimah B, *Perempuan Dalam Tafsir Modern* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 43.

¹⁴Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Umum* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 32-33.

¹⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Cet. I; Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), h. 26-27.

Organisasi-organisasi wanita Indonesia selama puluhan tahun berjuang untuk terwujudnya suatu peraturan tertulis yang mengatur perkawinan dan keluarga yang bisa memberikan perlindungan terhadap perempuan. Bahwa dorongan untuk melakukan pembaharuan mengenai kedudukan perempuan dalam hukum keluarga pada awalnya berasal dari kalangan perempuan sendiri, baik perorangan maupun kelompok. Tentu saja bisa dipahami karena kaum perempuanlah yang merasakan langsung dampak dari praktik-praktik ketidakadilan atas diri mereka dalam perkawinan. Meski secara umum bisa dikatakan bahwa kedudukan perempuan semakin dipertegas dalam kedua bentuk aturan yakni Undang-Undang perkawinan dan KHI, namun dalam perkembangan selanjutnya keduanya juga menjadi sasaran kritik sehingga perlu dilakukan kembali pembaharuan.¹⁶

Dalam pembahasan hukum keluarga ditempatkan dalam tema pernikahan, pembahasan tema ini selalu didahului dengan pemaparan mengenai nikah sebagai syariat Islam, hikmah dan hukum pernikahan, dilanjutkan dengan tata cara memilih calon istri atau suami, adab peminangan, syarat-syarat pernikahan antara lain wali dan saksi, proses pernikahan seperti ijab kabul, dilanjutkan adab pergaulan suami istri dalam rumah tangga seperti talak, iddah dan rujuk. Hal yang mendasari pentingnya pembaharuan dan perkembangan hukum Islam, termasuk mengenai kedudukan perempuan. Secara realitas, upaya-upaya pembaharuan tidak bisa dielakkan karena adanya tuntutan zaman dan keharusan penyesuaian dengan wilayah tempat hukum

¹⁶Kowani, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia* (Cet. XI; Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 136.

tersebut akan diterapkan. Upaya ini dilakukan agar tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dapat direalisasikan. Pola pikir inilah yang mendasari para ulama hukum Islam merumuskan perubahan hukum disebabkan karena adanya perubahan zaman dan tempat.¹⁷



¹⁷Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 68-69.

BAB III

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

A. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik dan barang orang lain. Pengertian ini kemudian dipakai dalam konteks perempuan, yaitu tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemudian dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta penyebab penderitaan dan kesengsaraan. Perempuan atau laki-laki mempunyai potensi untuk melakukan tindak kekerasan, yang menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik dan non fisik, yang dapat berakibat potensinya tidak mampu mengaktualkannya dalam kehidupan masyarakat.¹

Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat, sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan disatu pihak-pihak perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidasetaraan yang ada dalam masyarakat. Pihak yang tertindas, disudutkan pada posisi yang mereka berada dalam ketakutan melalui cara penampakan kekuatan secara periodik. Kekerasan terhadap pihak perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik dan ancaman psikologis termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Dalam perkembangannya kekerasan terhadap

¹Abdul Rahman, *Perempuan, Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Aluddin University Press, 2014), h.239.

perempuan sungguh tidak hanya terjadi dilingkungan rumah tangga tetapi bisa juga terjadi antara orang tua dan anak (kekerasan terhadap anak) atau antara majikan dengan pembantunya yang terjadi dalam lingkungan keluarga.

Pada umumnya tertuju pada kekerasan yang bersifat instan dan sensasional yang biasanya digembar-gemborkan oleh media massa, misalnya perampokan bank, pembajakan pesawat terbang, penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. Masyarakat pada umumnya tidak melihat dan memperhatikan gagasan perlunya melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk mengurai apa penyebab dibalik aksi kekerasan tersebut. Pentingnya identifikasi melacak akar permasalahan dibalik aksi kekerasan adalah dalam rangka mencari model pencarian solusi alternatif untuk tindakan kekerasan itu sendiri secara sistematis dan efektif.²

Memang sulit dipungkiri, antara perempuan, teologi, dan kekerasan bagaikan suatu lingkaran yang saling berkaitan satu sama lain. Tarik saja sejumlah koneksi diantara ketiganya, semuanya akan melahirkan hubungan yang memilukan, yang mengundang perasaan getir. jika kekerasan dan teologi dipadukan, maka yang menjadi objek adalah perempuan. Sementara pertemuan antara perempuan dan teologi selalu melahirkan kekerasan, minimal ada justifikasi untuk menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan. Dan diantara perempuan dan kekerasan selalu ada pembedanya dan akar-akarnya dalam teologi.

²Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), h. 57.

Istilah kekerasan biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka, dan yang baik bersifat menyerang atau bertahan yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Menurut Mansour Fakih, kekerasan tidak hanya diartikan sebagai serangan fisik saja, tetapi juga diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang.³

Salah satu pihak yang paling sering menjadi korban kekerasan dalam masyarakat itu adalah perempuan. Adapun beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain:

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya baik fisik, psikis maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat maupun bernegara.
2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termaksud ancaman tindakan

³Mansour Fakih, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan* (Cet. I; Jakarta: Grasido, 2000), h. 78.

tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.

3. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan kekuasaan yang dapat dimilikinya.

Luasnya makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realitas sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini diseluruh dunia. Pelakunya pun dari berbagai kalangan bisa dikenal bisa pula yang tidak dikenal.⁴

Kekerasan terhadap perempuan merupakan istilah yang berawal *marital rape*, yang berarti segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, kata *rape* berarti pemerkosaan sehingga diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Pemerkosaan yang dimaksud adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap istri atau sebaliknya. Pengertian yang lebih umum dipahami oleh masyarakat adalah tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga. Kekerasan adalah seluruh bentuk perilaku,

⁴Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 7.

verbal maupun nonverbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang lain yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran (korban). Devenisi ini tidak terbatas pada kekerasan seksual, tetapi segala macam bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang menimbulkan dampak negatif pada korbannya. Segala tindakan terhadap pihak lain, yang menyebabkan kerugian materi ataupun non materi, dalam pengertian inilah yang dipahami sebagai kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Hannan Najmah, seorang intelektual perempuan Islam mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bagian dan jenis kekerasan yang selalu didiamkan oleh masyarakat. Tidak dianggap sebagai permasalahan publik, terutama yang terjadi diranah domestik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perlakuan ini terjadi atas asumsi bahwa perempuan wajar menerima kekerasan berkaitan dengan posisinya sebagai ibu rumah tangga, anak dan istri. Melihat bahwa apa yang dirasakan kaum perempuan atas perlakuan kaum laki-laki dalam ruang domestik tidak dapat dibenarkan karena merupakan penyimpangan dari ajaran Islam, yang mengajarkan kasih sayang lemah-lembutan dalam berperilaku.

Indonesia misalnya terdapat tradisi yang menabukan pengungkapan kekerasan domestik terhadap perempuan ke publik. Pengungkapan dikhawatirkan akan menimbulkan aib keluarga, terutama aib suami. Ini merupakan pelanggaran hak domestik keluarga. Akibatnya ketika perempuan mendapat perlakuan yang tidak

⁵Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 11.

wajar, korban tidak bisa membela diri apalagi menuntut perilaku kekerasan di depan hukum. Jika kepala keluarga atau suami, melakukan tindak kekerasan terhadap anggota keluarganya hal itu dianggap wajar karena dengan tujuan mendidik keluarga agar patuh dengan sang ayah.⁶

B. *Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*

Secara umum kekerasan terhadap perempuan diklasifikasikan dalam dua bentuk, kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Seorang perempuan bisa mengalami kekerasan fisik atau kekerasan psikologis, atau juga bisa mengalami kedua bentuk kekerasan itu secara bersamaan. Pertama, kekerasan fisik adalah segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh atau anggota badan atau menyebabkan kematian, baik dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Kedua, kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan perasaan tidak berdaya pada korban.

Aksi kekerasan yang sering terjadi disekitar kita dilihat dari jenisnya dan dapat diklasifikasikan kedalam empat bentuk yaitu :

1. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung yang termasuk dalam kategori ini

⁶Abdul Rahman, *Perempuan, Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*, h. 111-113.

adalah semua bentuk pembunuhan individu atau kelompok, seperti pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal dan semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (pengusiran paksa terhadap masyarakat, penculikan, pemerkosaan, penganiayaan). Semua tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak untuk hidup.

2. Kekerasan Tidak Langsung

Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan sampai pada ancaman kematian, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi) yang bertanggungjawab atas kekerasan tersebut. Disini terdapat sub kategori yang bisa dibedakan, yakni kekerasan dengan pembiaran dan kekerasan yang termediasi. Dalam hal ini terdapat dua cacatan dalam kaitannya antara kekerasan karena pembiaran dan kekerasan termediasi. Pertama, banyak sisi yang melengkapi, kekerasan karena pembiaran dicirikan dengan kondisi yang tetap, sedangkan kekerasan yang termediasi lebih sering dikaitkan dengan gerakan yang dinamis yang menghubungkan antara modifikasi lingkungan sebagai penyebab terjadinya kekerasan.

3. Kekerasan Represif

Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak dasar untuk bertahan hidup dan untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan. Oleh karena itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia seperti mengekang kebebasan, martabat manusia dan kesamaan hak bagi setiap manusia. Kekerasan represif terkait dengan tiga hak dasar manusia yaitu: hak sipil, hak politik, hak sosial. Hak sipil adalah kebebasan untuk berfikir, beragama, kebebasan berorganisasi dan privasi serta kesamaan dihadapan hukum. Hak politik berkaitan dengan hak berpartisipasi masyarakat secara demokratis dalam kehidupan politik seperti mengikuti pemilihan umum serta kebebasan berbicara dan berpendapat. Sedangkan hak sosial berkaitan dengan larangan untuk menciptakan atau memiliki serikat buruh atau larangan untuk melakukan mogok kerja.

4. Kekerasan Alienatif

Kekerasan alienatif merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya atau intelektual. Pentingnya memasukkan hak-hak asasi manusia kedalam jenis kekerasan alienatif ini adalah untuk menegaskan bahwa manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non material, kepuasan kerja, terlibat dalam kegiatan-kegiatan kreatif, kebutuhan anak

akan kasih sayang, rasa kepemilikan secara sosial atau identitas budaya.⁷

Posisi seorang perempuan dan seorang laki-laki dalam suku-suku dan masyarakat-masyarakat tersebut adalah sama persis. Merujuk pada perkawinan mereka, perempuan semata diciptakan untuk pria, sosok perempuan merupakan aksesori pria dalam eksistensi dan kehidupannya. Adalah sang ayah yang memilikinya ketika belum menikah, dan sang suami mengambil alih hak tersebut segera setelah pernikahan. Pria dapat menjualnya, memberikannya, atau menyewakannya pada beberapa pria lain untuk tujuan kumpul kebo atau pelacuran, reproduksi atau pelayanan dan sebagainya. Pria dapat menjatuhkan kepadanya hukuman apapun yang telah diputuskan atasnya, bahkan sekalipun hukuman mati. Pria dapat menelantarkannya tanpa memedulikan apakah ia dapat hidup atau mati, dalam masyarakat-masyarakat kanibal. Pria di perbolehkan membunuh perempuan untuk dijadikan santapannya, baik disaat pesta maupun masa kekeringan. Semua barang dan hak perempuan menjadi milik pria dan hanya pria yang berhak melakukan segala transaksi penjualan, pembelian, penerimaan, dan penolakan atas nama perempuan.⁸

Seperti halnya kondisi perempuan di Arab Saudi, perempuan setelah menyelesaikan pendidikan. Mereka hanya dapat mencari kerja pada lembaga-lembaga

⁷Ridwan M.Ag, *Kekerasan Berbasis Gender* (Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka), h. 60.

⁸Ali Hoesin Hakeem, *Membela Perempuan, Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama* (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2005), h.52-53.

wanita, seperti sekolah atau rumah sakit. Hukuman melarang mengemudi mobil, mobilitas dibatasi dengan perempuan hanya naik mobil yang dikemudikan sopir pribadi atau bis-bis umum yang memiliki bagian khusus bagi perempuan. Ketiadaan kemerdekaan bagi kaum perempuan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan psikologis.⁹

Selain itu, bentuk- bentuk kekerasan terhadap perempuan bisa di klasifikasi berdasarkan tempat kejadian, berdasarkan kriteria ini bisa diidentifikasi antara lain : kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan di dalam masyarakat, kekerasan ditempat kerja.

a. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Dikalangan masyarakat masih kuat anggapan bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada istri, karena suami mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan biduk rumah tangga. Menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinat dihadapan kaum laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya terdiri dari tiga jenis yaitu: kekerasan intim (*intimate violence*), kekerasan pribadi (*private violence*), kekerasan dalam rumah (*family violence*), terjadi pada anggota keluarga secara keseluruhan. bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) adalah berupa tindakan, antara lain :

⁹Harun Nasution dan Bahtiar Efendi, *Hak Azazi Manusia Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 257.

- 1) Mendorong, menampar, memukul, menendang, mencekik, dan menjambak rambut.
- 2) Menusuk dengan benda tajam, menyentuh kulit dengan rokok, menyengat dengan aliran listrik.
- 3) Tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin padahal suami memiliki kemampuan.
- 4) Menghina, membentak, mencaci, merendahkan, dan mengancam.
- 5) Perkosaan terhadap istri dan pelecehan seksual serta pembunuhan.¹⁰

b. Kekerasan dalam masyarakat

Kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat adalah kekerasan yang dialami kaum perempuan dalam hubungan sosial kemasyarakatan sebagai seorang anggota masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan dalam masyarakat

antara lain : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- 1) Tidak memberi kesempatan untuk berkumpul dan berorganisasi.
- 2) Pemerkosaan, pelecehan seksual, pornografi.
- 3) Peniadaan sumber daya ekonomi.
- 4) Perdagangan perempuan untuk dipekerjakan atau dilacurkan.¹¹

¹⁰Harun Nasution dan Bahtiar Efendi, *Hak Azazi Manusia Dalam Islam*, h. 240-242.

¹¹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 28.

Pakaian dapat dikatakan sebagai simbol kemanusiaan dan kepribadian, melambangkan martabat dalam kehidupan masyarakat, yang berfungsi tidak hanya melindungi cuaca panas dan dingin, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan moral. Pakaian dalam berbagai bentuk dan modelnya mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Suatu masa dan masyarakat atau bangsa memiliki ciri khas tersendiri, yang juga tidak bisa dipungkiri satu dengan lainnya, antara masyarakat atau suatu bangsa saling memengaruhi budaya dalam berpakaian sehingga terjadi asimilasi atau akulturasi kebudayaan atau kadang-kadang penerimaan sepenuhnya tanpa melakukan penyaringan, termaksud model dan gaya berpakaian pornografi dan pornoaksi. Terutama di zaman modern yang begitu mudah mengakses informasi melalui media cetak dan elektronik.¹²

Kebebasan pornografi dan pornoaksi merupakan produk barat yang menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Pelaku pornografi dan pornoaksi banyak digemari oleh dunia model dan hiburan, yang dapat dinikmati tidak hanya masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat pedesaan, sehingga dari masa ke masa pornografi dan pornoaksi semakin digemari terutama di kalangan generasi muda. Sehingga realitas ini mendatangkan berbagai problema dalam masyarakat.

c. Kekerasan di tempat kerja

Kekerasan yang dialami kaum perempuan dalam hubungan kerja sebagai seorang pekerja, karyawan atau buruh. Hampir setiap tahun ada ribuan

¹²Neng Jubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 87.

buruh migran berangkat keluar negeri dan hampir 80%-nya perempuan, buruh migran Indonesia tidak hanya mengalami persoalan pada masa menjalani pekerjaannya. Berbagai persoalan timbul mulai dari pra pemberangkatan, masa kerja dan pasca pemulangan. Perempuan selalu menjadi sasaran empuk untuk dipekerjakan dengan alasan yang dapat menggiurkan, apalagi mengiming-iming gaji yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa perempuan sebagai tenaga kerja tidak memiliki keterampilan, juga tingkat pendidikan masih relatif rendah sehingga mudah tergoda untuk sebuah pekerjaan.¹³

Ada pun bentuk-bentuk kekerasan di tempat kerja yaitu :

- 1) Perdagangan perempuan untuk dipekerjakan atau dilacurkan.
- 2) Penolakan buruh kerja perempuan
- 3) Memberi gaji lebih kecil bagi perempuan untuk pekerjaan sama dengan laki-laki.
- 4) Tidak memberikan kesempatan untuk meningkatkan karir secara sama.
- 5) Pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.
- 6) Pemerasan dan pungutan liar terhadap buruh perempuan.¹⁴

¹³Harun Nasution dan Bahtiar Efendi, *Hak Azazi Manusia Dalam Islam*, h. 245.

¹⁴Abdul Rahman, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*, h. 165-166.

Perdagangan perempuan melanda berbagai negara, termasuk negara Indonesia yang dilakukan dengan bentuk dan cara yang rapi sehingga sulit untuk mengidentifikasinya. Pelaku sering kali merupakan sindikat yang terorganisasi, berkedok mencari tenaga kerja legal. Umumnya mereka menawarkan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri, seperti Timur Tengah, Jepang, Korea Selatan serta negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dalam peta dunia perdagangan perempuan, Indonesia dinyatakan sebagai negara asal dari kebanyakan korban, hal ini terlihat dari tiga aspek yaitu. *Pertama*, maraknya perpindahan perempuan dari satu tempat ke tempat lain, baik terjadi di dalam negeri maupun luar negeri, yang bukan atas keinginan sendiri atau pilihan bebas mereka sendiri melainkan karena terpaksa karena situasi, seperti kemiskinan dan keinginan memperbaiki nasib. *Kedua*, keuntungan yang diperoleh perekrut, penjual, dan sindikat atas perpindahan tersebut. *Ketiga*, berbagai bentuk penipuan termasuk janji palsu, ikatan utang, perbudakan, pemaksaan, tekanan dan pemerasan untuk mencapai keuntungan.¹⁵

Manusia di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup langgeng tanpa bantuan orang lain, sehingga untuk menunaikan keperluan tersebut manusia menetapkan tata nilai agar kebebasan yang dimilikinya tidak menciderai kebebasan orang lain.

¹⁵Abdul Rahman, *Perempuan, Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*, h. 135-136.

Kebebasan adalah hak setiap manusia, merupakan naluri, fitrah manusia, baik secara individu, keluarga, masyarakat atau pun sebagai sebuah bangsa.¹⁶

Perempuan sebagai mitra di tempat kerja mempunyai posisi dan peran penting dalam pengelolaan dan pertumbuhan ekonomi, baik bersifat domestik maupun yang bersifat publik. Meskipun ia memiliki keunggulan, dapat berperan ganda, sebagai ibu rumah tangga yang mengelolah dan memanfaatkan hasil usaha suaminya, juga dapat menambah pendapatan ekonomi rumah tangganya, yang melakukan proses kehidupan mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman.

Sejak terbentuknya kesempatan kerja bagi perempuan di luar peran sebagai ibu rumah tangga, ia menyesuaikan peran sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah. Partisipasi kerja ini tidak saja menyebabkan penambahan penghasilan rumah tagga, tetapi juga meningkatkan peran dalam mengambil keputusan. Perempuan yang bekerja merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial perempuan yang dilakukan berdasarkan kemampuan kerja dan dapat menduduki peran penting dalam sebuah instansi swasta atau negeri. Meskipun perempuan banyak yang mulai meramaikan dunia profesional, namun hambatan kaum hawa untuk menunjukkan eksistensinya dalam dunia kerja menjadi

¹⁶Abd Al-Baqi Randum, *Khatar Al-Tabarruj wa Al-Ikbtalat* (Cet. VIII; Beirut: Muassasat Al-Risalah, 1992), h. 225.

kendala yang sulit dihindari. Kendala untuk bersaing adalah keterbatasan fisik, selain fisik juga menyangkut fungsi reproduksi sebagai istri yang tidak bisa digantikan oleh kaum laki-laki.

Kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan adalah bagian dari cara kaum laki-laki dalam mengekspresikan maskulinitasnya sebagai pribadi yang kuat dan otoritas serta kekuasaan dalam bentuk kemampuan untuk mendominasi dan mengendalikan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Potensi kekerasan yang menimpa kaum perempuan sebagai bias ideologi patriarki melahirkan beragam bentuk kekerasan dan faktor pendorong terjadinya sebuah kekerasan terhadap perempuan yaitu:

- a) Dengan karakteristik fisik dan reproduksi, perempuan memang lebih mudah menjadi korban, khususnya kekerasan pembunuhan.
- b) Dalam relasinya dengan laki-laki, pemakna sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan penguatan mitos, aturan, praktek yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dapat berlansung dalam keluarga, bisa pula ditempat kerja.
- c) Dari sisi ekonomi, perempuan dapat dijadikan sasaran pengeruk keuntungan, sehingga merebakkan pelacuran, perdagangan perempuan dan pornografi.
- d) Kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat digunakan sebagai sarana teror, penghinaan atau ajakan perang pada kelompok lain. Kesucian perempuan dilihat sebagai kehormatan masyarakat sehingga penghinaan

atau merusakkan kesucian perempuan akan dipahami sebagai penghinaan terhadap masyarakat.

Upaya penghapusan budaya kekerasan yang lahir sebagai bias ideologis haruslah dilakukan dengan cara melakukan pembongkaran ideologis yang selama ini sudah mengakar kuat. Pembongkaran wacana ideologis ini penting sebagai pintu masuk untuk melakukan peningkatan konsep kebudayaan sebagai instrumen pembentukan nilai-nilai baru. Proses penguatan psikologis juga perlu dilakukan agar kaum perempuan mampu melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang utuh, sebagai subjek sebagai pribadi yang otonom dan kehadirannya bukan semata-mata sebagai pelengkap hidup.¹⁷

C. Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan dalam seluruh aspek hubungan antara manusia, yaitu dalam hubungan keluarga dan orang-orang dekat lainnya berbagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan masyarakat, baik situasi normal maupun dalam situasi perang atau konflik. Yang terjadi pada masyarakat modern dewasa ini berupa pelecehan seksual, menurut kriminologi, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah :

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tindakan senonoh dan jahat.

¹⁷Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka), h. 72.

2. Gaya hidup dan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lain untuk berbuat keji dan jahat, artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menjerumuskan dalam perilaku yang tidak manusiawi.

7. Keinginan pelaku untuk melakukan dan melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.¹⁸

Di samping itu kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan, menurut studi tersebut ada empat penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu : ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki, perlakuan kekerasan sebagai jalan keluar topik, otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan, dan hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga.¹⁹

Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya karena itu merupakan bagian dari kejahatan itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu mengurangi stress. Sementara itu, perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri sehingga membuat norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan posisi laki-laki yang dominan dan perempuan pada

¹⁸Mia Amalia, “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, *Wawasan Hukum* 25, no.02 (2011): h. 406.

¹⁹Niken Savitri, *Perspektif Gender Dalam Peradilan, beberapa kasus*, Convention Watch-PKWJ UI (Jakarta, 2006), h. 83.

posisi ter subordinasi. Hal tersebut yang mempengaruhi peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan.²⁰

Seksisme dapat juga dikategorikan sebagai sebuah bentuk kekerasan yang berdimensi rasisme. Dengan dalih adanya perbedaan psikologis dan biologis yang fundamental antara laki-laki dan perempuan (peran reproduktifnya, ukuran dan kekuatan fisik), hirarki sosial yang disangkakan sebagai takdir Tuhan telah dikembangkan sehingga menguntungkan kaum laki-laki. Tetapi perlu ditekankan bahwa ada bias ideologis di dalam pendekatan yang mengarah pada pemenjaraan laki-laki dan perempuan dalam peran-peran sosial. Ideologi seksisme ini menambah pada dimensi kehidupan perempuan yang ter subordinat dan teralienasi secara sosial. Implikasi yang nyata dari ideologi ini dikaitkan dengan jenis pekerjaan perempuan di sektor industri termanifestasi jelas pada jenis pekerjaan dan pola pengajian buruh perempuan yang berbeda dengan buruh laki-laki. Pembagian buruh berdasarkan jenis kelamin ini mengakibatkan alienasi psikologis dalam bentuk diskriminasi.²¹

Dalam banyak studi dinyatakan bahwa penganiayaan perempuan berkaitan erat dengan kedudukan subordinatif kaum perempuan di dalam masyarakat. Perbuatan ini dikategorikan dalam kejahatan seksual yang berkonotasi sebagai kejahatan terhadap seseorang karena ia berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, kejahatan ini disebut juga kejahatan berbasis gender. Kedudukan subordinatif kaum perempuan itu, antara lain disebabkan karena relasi gender yang tidak seimbang

²⁰Mia Amalia, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, h. 405.

²¹Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka), h. 68.

antara laki-laki dan perempuan. Di masyarakat masih kuat anggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan, dan laki-laki memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan biduk rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme krusial yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinasi laki-laki.²²

Perempuan dalam kebudayaan patriarkal diketahui oleh pesan-pesan yang menegatifkan atau meremehkan keberadaan mereka. Tubuh seksual mereka dianggap ancaman berbahaya bagi kemurnian laki-laki dan menjadi alasan untuk membenarkan aniaya verbal dan fisik terhadapnya. Perempuan mengalami tubuhnya sebagai sasaran yang paling mudah dieksploitasi, parahnya lagi bahwa pada saat yang sama mereka pun diberitahu bahwa tubuh mereka yang seksi itu memang pantas dieksploitasi. Dengan ungkapan lain, segala bentuk eksploitasi atas tubuh mereka adalah karena mereka sendirilah penyebabnya. Dengan demikian, perempuan mengalami dua kali serangan. Sebagai korban sekaligus sebagai penyebab korban kekerasan.²³

Peremehan terhadap perempuan seringkali “dibenarkan” dengan alasan bahwa perempuan mempunyai sifat bodoh bawaan, tidak terdidik, tidak berwibawa, dan tidak mampu menjaga diri. Semua penilaian atas tubuh perempuan digunakan untuk membenarkan penyingkiran perempuan dari kesempatan-kesempatan kultural dan kepemimpinan. Akhirnya, perempuan diminta untuk menerima hal ini sebagai sanksi

²²Sitti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia konsep dan Implementasi* (Cet. I; Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), h. 183.

²³Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia konsep dan Implementasi*, h. 187.

normal, alamiah dan suci. Sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi substansi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat, kurang responsif terhadap kepentingan perempuan, terutama dalam masalah kekerasan. Misalnya, KHUP tidak memadai lagi untuk mencakup realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat. Banyak bentuk kekerasan yang tidak tertampung dalam KHUP, demikian pula sanksinya dinilai tidak sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat.²⁴

Berbagai bentuk kekerasan yang dialami kaum perempuan serta penyebab terjadinya kekerasan tersebut, harus mendapat perhatian penting dan pengawasan berbagai lembaga-lembaga hukum dan berbagai organisasi perempuan. Hal ini berarti kurangnya pendalaman atau penetapan sanksi kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan, maka dari itu pentingnya pengembangan ideologi mengenai peran perempuan baik dalam sektor domestik maupun publik. karena laki-laki dan perempuan diciptakan sama derajatnya, maka tidak ada bentuk diskriminasi yang diajarkan dalam agama Islam mengenai posisi perempuan dalam masyarakat. Peran pendidikan dalam mengantisipasi masalah tersebut sangat penting, dengan berpendidiknya seseorang maka tindak kekerasan yang dianggap dapat merugikan bahkan membahayakan nyawa seseorang, maka perbuatan tersebut tidak dilakukan karena dianggap perbuatan melawan hukum.

²⁴Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia konsep dan Implementasi*, h. 185.

BAB IV

PERAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN PEREMPUAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Islam

Pada masa jahiliyah, masyarakat memandang rendah kaum perempuan. Adapun perlakuan rendah terhadap perempuan adalah kaum perempuan kehilangan kemerdekaan, diskriminasi hukum, kriminal, kebebasan mengubur hidup-hidup anak perempuan, perkawinan paksa, kaum perempuan dijadikan barang warisan, wanita dianggap binatang najis. Dan setelah Islam diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, maka konsepsi-konsepsi sebagaimana yang ada pada masyarakat jahiliyah dikikis perlahan hingga kemudian tiada.¹ Hal tersebut sangat jelas dalam pandangan Islam laki-laki dan perempuan satu martabat. Hal ini ditegaskan dalam al-Quran menjelaskan QS an-Nisa/32 yang berbunyi :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

¹Achmad Masruch Nauscha, *Kaum Wanita Dalam Pembelaan Islam* (Cet. I; Semarang: CV. Toha Putra, 1983), h. 25.

Terjemahanya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap dikaruniakan yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagian perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²

Dari ayat tersebut di atas nampaklah betapa Islam sangat menghargai kaum wanita, bahkan bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat kelak. Adapun dalam kehidupan rumah tangga Islam memandang perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci, sunnah Nabi dan merupakan ibadah kepada Allah. Olehnya itu Islam sangat memperhatikan perkawinan atau kehidupan rumah tangga. Dalam agama Islam telah terdapat aturan-aturan dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri. Jika dicermati tentang bagaimana hukum Islam melindungi hak-hak perempuan contohnya dalam rumah tangga, maka disimpulkan bahwa tindakan melanggar apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah tersebut, di dalam hukum Islam merupakan perbuatan penganiayaan terhadap istri atau pun suami. Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dengan cara mengabaikan kewajibanya, menganiaya istri dengan cara memukul sehingga terluka atau bahkan meninggal dunia merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan di dalam hukum Islam tersebut merupakan Jarimah (kriminalitas).³

Sesungguhnya islam mengajak manusia agar memuliakan wanita sejak masih kecil. Islam menyerukan agar memperhatikannya dan mengurusinya dengan baik.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 83.

³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Cet. II: Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1.

Islam menyerukan agar membaguskan dalam pendidikannya, agar kelak menjadi wanita shalihah, bias menjaga diri. Demikian pula islam mencela perilaku jahiliah yang mengubur anak wanita mereka hidup-hidup. Rasulullah bersabda :

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ

Artinya:

Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian perbuatan durhaka kepada ibu-ibu kalian, mencegah dan meminta serta mengubur anak perempuan hidup-hidup. (HR. Bukhari)

Jadi pada dasarnya Islam memandang kekerasan adalah Jarimah (kriminalitas), meskipun dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Meskipun pada dasarnya hukum perkawinan di dalam hukum Islam tergolong hukum privat (perdata) dalam istilah hukum barat. Namun, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, maka hal tersebut telah tergolong hukum publik (jinayat/pidana Islam) dan akan dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan tindakan yang dibuatnya.

Misalnya kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami yang menfitnah istrinya berzina, padahal hal tersebut tidak dilakukan oleh istri, maka dalam keadaan ini suami tidak bisa membuktikan tuduhannya itu, pelaku dikenakan pidana hudud yang diancam dengan hukuman berat, yaitu 80 kali dera. Olehnya itu, bagi korban yang

tertuduh melakukan zina dapat mengadu tuduhan tersebut kepada pihak yang berwajib.⁴

Demikian kekerasan terhadap perempuan, bahwa kekerasan merupakan Jarimah (kriminal) jadi seseorang yang melakukan hal tersebut maka harus dikenakan sanksi pidana. Ada pun sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik yang merupakan penganiayaan pada anggota tubuh yang dapat berakibat, matinya korban, luka atau korban merasa kesakitan. Dalam hukum Islam, kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengidentifikasi apakah penganiayaan yang mengakibatkan mati tersebut merupakan kesengajaan, semi-sengaja (menyerupai sengaja) atau tidak sengaja.⁵ Jika pelaku sengaja, maka berlaku baginya hukum qishash atau diyat. Dalam arti jika pelaku tidak dimaafkan oleh wali korban, maka berlaku baginya pidana qishash, jika dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah ta'zir. Sedangkan bagi pembunuh semi-sengaja sanksi pidananya adalah diyat yang diperberat. Lain halnya

⁴Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press), h.25-27.

⁵Zinuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

dengan membunuh karena kesalahan pelaku dalam bentuk pembunuhan seperti ini adalah dikenakan sanksi pidananya diyat.

Kekerasan fisik yang tidak mengakibatkan kematian pada korbannya adalah penganiayaan atas anggota badan dan semacam pemotongan, perusakan seperti memotong tangan, kaki, jari, hidung, merontokkan gigi, dan lain-lain. Hukuman pokok bagi pelaku yang dilakukan dengan disengaja adalah qishash, penggantinya diyat atau ta'zir, sedangkan yang menyerupai sengaja dan keliru adalah diyat yang penggantinya adalah ta'zir. Menghilangkan anggota badan di mana kekerasan ini hanya mengakibatkan hilangnya manfaat anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Terkait masalah ini, hukuman pokoknya adalah qishash, sedangkan hukuman penggantinya diyat.

Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala, hukuman bagi tindakan pidana seperti ini adalah qishash dan hukuman penggantinya adalah diyat ghair kamilah atau irsy atau ganti rugi. Selain itu al-Jihrah adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan menghilangkan anggota badan. Tindak pidana jenis ini meliputi pelukaan pada leher, dada, perut sampai batas pinggul. Hukumannya jika korban mengalami luka dalam adalah qishash dan apabila qishash tidak bisa dilaksanakan, maka hukumannya adalah sepertiga diyat.⁶

⁶M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.242-243.

2. Kekerasan psikis di dalam hukum Islam kekerasan yang lebih luas ketimbang dalam hukum positif. Dalam hukum Islam, kekerasan psikis merupakan hal yang juga diharamkan, sebab sebagai mana diketahui syariat turun untuk melindungi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam Islam yang juga mendapatkan perlindungan adalah agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa kekerasan psikis dalam Islam juga mendapat perhatian serius. Adapun landasan hukuman bagi hal ini menurut para ulama adalah al-Quran menjelaskan QS al-Baqarah/194 yang berbunyi:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

الْمُتَّقِينَ

ALAUDDIN
MAKASSAR

Terjemahannya:

Bulan Haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati, Berlaku (hukum) *qisas*. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah dia, setimpal dengan serangan terhadap kamu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁷

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Qur'an,2009), h.

Namun menurut al-Qurthuby hukuman bagi pelaku yang mendiskreditkan korban seperti di atas adalah dipenjarakan di rutan. Dan mengenai waktu dipenjarakannya ditentukan oleh hakim atau penguasa.

3. Kekerasan seksual yang meliputi memaksa istri bersetubuh dengan cara yang diharamkan agama. Adapun sanksi hukuman bagi pelaku adalah ta'zir, jika pelaku (suami) tidak berhenti maka patut diceraikan dengan alasan demikian dan jika istri ridha, maka ia berdosa. Sementara bagi suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan seksual dengan orang lain, hal tersebut dianggap zina. Namun dalam hal ini paksaan yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat paksaan, seperti ancaman yang menyertai paksaan berat, apa yang diancam seketika yang mesti terjadi, orang yang memaksa mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan ancamannya, pada orang yang menghadapi paksaan timbul dengan kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan terjadi serta perkara yang diancamkan adalah perkara yang dilarang. Dalam posisi seperti ini istri tidak dikenakan sanksi pidana, adapun suami yang melakukan paksaan tersebut adalah turut berbuat tidak langsung terhadap tindak pidana zina. Dalam konteks ini dikenai hukuman ta'zir yakni perbuatan pidana yang berbentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh hakim.

4. Kekerasan ekonomi

Dalam Islam, laki-laki yang berstatus sebagai suami harus menafkahi istrinya, baik secara lahir maupun batin. Tindak suami yang menelantarkan istrinya baik dengan cara tidak memberikan apa yang menjadi haknya, maupun suami yang mempekerjakan istri kemudian mengambil hasilnya, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dengan cara merampas hak istri (harta benda). Olehnya itu, terkait masalah merampas harta benda ini, pelaku dapat dikenakan hukuman ta'zir dengan cara mengambil sebagian harta dari si pelanggar.

Namun sepanjang penelitian terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri di dalam hukum Islam tidak diberlakukan sebagai hukum positif, baik dalam KHUP maupun dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004. Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, merupakan ruang lingkup hukum perdata (privat). Selain itu, jika kekerasan terhadap istri tidak terlalu fatal, umumnya istri tidak mengadukannya kepada pihak yang berwenang, karena berpotensi besar akan membuat retak atau bisa menyebabkan perceraian. Sementara itu perceraian dalam Islam merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Jadi umumnya penyelesaian kekerasan terhadap istri diselesaikan dengan kekeluargaan dengan cara dihadirkan mediator. Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari Allah SWT, menyandarkan segala ketentuan dari syariat. Islam memandang manusia sama dihadapan Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya. Begitu pun jika

dipandang tentang hakikat manusia itu sendiri, manusia menurut Islam terdiri atas unsur jasmani dan rohani dalam arti Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi.⁸

B. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Tafsir Keagamaan

Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena begitu mengakarnya budaya patriarki di kalangan umat Islam, patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan dan perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki. Hingga saat ini mekanisme kontrol dengan kekerasan masih umum dilakukan untuk meligitimasi kekuasaan, selama patriarki disepakati keniscayaan alamiah, sejauh ini pula kekerasan terhadap kaum perempuan terus berlangsung. Sebagai objek kekerasan, perempuan masih selalu disudutkan pada pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kekerasan yang mereka alami. Mitos kejatuhan Adam dari surga yang disebabkan oleh kerapuhan iman Hawa, maka sepanjang sejarah perempuan selalu dituduh sebagai pihak penggoda sehingga mendorong laki-laki untuk berbuat tindakan yang tidak senonoh, seperti memperkosa. Bila dilihat kembali sejarah kuno, ditemukan fakta-fakta penting yang berkenaan dengan kedudukan perempuan di rumah dan di masyarakat.⁹

⁸M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h.246-250.

⁹Nawal El Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, terj. Zulhimiyasri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 183-185.

Dalam relasi sosial, konsep kodrat diletakkan pada anatomi tubuh sebagaimana dipahami sebagai konsepsi jenis kelamin. Susunan tubuh perempuan (kodrat) menyebabkan perempuan memiliki tugas tertentu, begitu juga laki-laki. Perempuan sudah dikodratkan memiliki tubuh yang lemah, sedangkan laki-laki memiliki tubuh yang kuat. Demikian halnya dengan kualitas pemikiran di mana laki-laki dianggap lebih cerdas dan terampil (otaknya lebih besar), dari pada perempuan.¹⁰

Masyarakat tidak dapat menutup mata bahwa dalam kurung waktu yang sangat panjang dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarjinalkan bahkan didiskriminasi. Hal ini dapat dilihat dengan nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik. Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan demikian itu, selain karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, keadaan timpang tersebut boleh juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawan. Hal ini misalnya terlihat pada penafsiran mereka pada ayat al-Qur'an pada QS an-Nisa/34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

¹⁰Nila Sastrawati, *Laki-Laki dan Perempuan Identitas Yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 11.

نُشَوِّزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١١﴾

Terjemahannya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisang ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, maha besar.¹¹

Ayat di atas tidak secara langsung memerintahkan sesuatu dengan mengatakan, “Wahai kaum pria kalian wajib menjadi pemimpin” atau sebaliknya, “Wahai kaum wanita, kalian mesti menerima pemimpin atau di pimpin”. Argumen yang dimunculkan oleh ayat ini, mengapa kaum pria menjadi pemimpin kaum wanita, mengemukakan dua macam alasan yaitu:

1. Karena ketentuan, Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita).
2. Karena kaum pria memberi nafkah kepada wanita (sebagai istri).

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 84.

Para ahli tafsir menyatakan bahwa pemimpin, penanggungjawab, pengatur, pendidik dan sebagainya. Kategori-kategori ini tidaklah menjadi persoalan yang serius, sepanjang ditempatkan secara adil dan tidak didasarkan oleh pandangan yang diskriminatif. Namun secara umum para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas ini diciptakan Allah Swt, sehingga tidak akan pernah berubah. Kelebihan laki-laki dari perempuan sebagaimana dinyatakan dalam ayat di atas oleh para penafsir al-Qur'an dikatakan karena akalunya dan fisiknya. Dalam tafsir Al-Razi, mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal: ilmu pengetahuan/akal dan pikiran dan kemampuan. Artinya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal perempuan, bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna.¹²

Pada tahap berikutnya, yakni setelah hadirnya Islam sebagai penuntun, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan bagi manusia, membuat pandangan terhadap wanita berubah, harkatnya pun naik, dan tindak penindasan serta kesewenang-wenangan pun lenyap. Misi pokok al-Quran diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari bentuk diskriminasi dan penindasan, oleh karena itu jika terdapat penafsiran bentuk penindasan dan ketidakadilan, maka penafsiran tersebut perlu dikaji ulang. Allah Swt menciptakan alam dan seisinya yang beraneka ragam termasuk di dalamnya manusia, baik laki-laki dan wanita. Di antara semua makhluk, manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, dan kedudukan terhormat dengan

¹²Syarifah Fauziah, *Kesetaraan Dan Keadilan Jender Dalam Tafsir Al-Maraghi* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.106.

bentuk dan kemuliaan inilah manusia disiapkan untuk menjalankan dua misi sekaligus sebagai *abid* dan *khalifah* yaitu:

a. Laki-laki dan wanita sama-sama sebagai hamba.

Salah satu tujuan diciptakan manusia adalah untuk menyembah kepada tuhan, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Quran biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa dan untuk mencapai derajat dan tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. dalam kapasitas sebagai hamba laki-laki dan wanita masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya.¹³ Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan kaum wanita pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya maupun untuk masyarakat dan bangsanya.

b. Laki-laki dan wanita sama sebagai khalifah.

Maksud dan tujuan manusia diciptakan di muka bumi, di samping sebagai hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Laki-laki dan wanita mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan kekhalfanya di bumi.

¹³Badriah Fayumi, *Keadilan dan Kesetaraan Jender dalam Perspektif Islam* (Cet. I; Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 31.

Prinsip utama ajaran Islam adalah persamaan antara laki-laki dan wanita, bangsa, sesama manusia, baik laki-laki maupun wanita. Adapun yang membedakan tinggi rendahnya seorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah yang maha esa.¹⁴

Pada saat Islam hadir di tengah masyarakat Arab, bangsa Arab pola kehidupannya nomaden. Perang dan serangan mendadak adalah bagian dari kehidupan mereka dan mereka berharap memiliki kekuatan fisik yang sangat penting untuk membela suku dan melindungi tanah mereka. Dalam lingkungan ini, laki-laki adalah simbol keamanan dan kekuatan. Setiap suku jauh lebih membutuhkan laki-laki untuk pertahanan mereka. Kenyataan ini telah menurunkan nilai perempuan di dalam masyarakat dan membawa pilihan kepada laki-laki sehingga menyebabkan pembantaian anak perempuan.

Dalam Islam, semua manusia dihadapan Allah hanya bisa dinilai sama dan sejajar. Keunggulan individu oleh Allah hanya bisa diukur dengan kualitas ketaqwaanya seseorang, perasaan keunggulan ras, suku, bangsa atau warna kulit dipandang sebagai keunggulan semu yang kalau dijadikan legitimasi untuk menindas kelompok lain yang pada posisi subordinat justru merupakan pengingkaran makna kemerdekaan individu sebagai sifat dasar pada diri setiap manusia sejak lahir. Misi utama al-Quran adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk anarki,

¹⁴Noer Huda Noor, *Wawasan al-Qur'an Tentang Perempuan* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 122.

ketimpangan dan ketidakadilan. Jika ada penafsiran teks keagamaan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, maka penafsiran tersebut harus ditinjau kembali. Allah maha adil maka tidak mungkin didalam kitab sucinya terkandung suatu yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Di dalam Islam, ada beberapa isu kontroversial berkaitan dengan relasi gender yang kemudian melahirkan akar-akar kekerasan seperti membolehkan suami memukul istrinya dengan konsep domestifikasi dengan peran perempuan, asal usul penciptaan perempuan, poligami, serta peran publik perempuan.

Akal dan kemampuan laki-laki melebihi akal dan kemampuan perempuan sehingga pekerjaan apapun yang dilakukan laki-laki akan lebih sempurna dibandingkan perempuan. Demikian halnya ketika aktifitas laki-laki dan perempuan ditempatkan pada ranah politik, perbedaan eksistensi perempuan dalam ranah politik tidak terlepas dari paham-paham keagamaan baik dari kelompok konservatif maupun liberal. Kelompok konservatif melihat Islam (fikih), sejak kemunculan di Mekah dan Madinah tidak memperkenankan perempuan terjun ranah politik. Sedangkan kelompok liberal progresif menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenankan konsep keterlibatan perempuan pada bidang politik. Selain pendapat kelompok tersebut, kelompok apologetic memandang perlu bagian wilayah

tertentu yang membolehkan perempuan ikut berkiprah, dan ada pada wilayah yang sama sekali tidak boleh dijamah perempuan, termasuk wilayah politik.¹⁵

Pola relasi yang tidak seimbang di antara anggota keluarga memungkinkan terjadinya berbagai tindakan kekerasan fisik maupun psikis baik dalam bentuk marginalisasi, subordinasi maupun kekerasan dalam keluarga antara lain disebabkan oleh adanya pola relasi kekuasaan yang timpang yang mengandaikan pola relasi struktural dan atas bawah yaitu relasi antara penguasa dan dikuasai. Membangun fondasi kehidupan rumah tangga yang berkeadilan dan bermartabat secara tidak langsung merupakan sebuah pemberdayaan untuk mengelolah seluruh potensi keluarga guna kesejahteraan keluarga yang bersangkutan. Sikap pengabaian hak-hak kemanusiaan anggota keluarga berarti menutup ruang bagi anggota keluarga untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki, itu berarti merugikan bagi perkembangan keluarga bersangkutan. Dengan demikian, pentingnya penegakan berbagai prinsip kehidupan dalam keluarga sangatlah penting, agar terciptanya kemaslahatan dalam sebuah keluarga.

Kehidupan keluarga adalah miniatur kecil dari potret kehidupan bangsa pada umumnya, sehingga melihat potret kehidupan sebuah bangsa bisa dilihat dari kehidupan unit terkecilnya dari masyarakatnya yaitu kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian membangun karakter dan moralitas bangsa harusnya dimulai dari

¹⁵Nila Sastrawati, *Laki-Laki dan Perempuan Identitas Yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*, h. 13-14.

kehidupan rumah tangga sebagai unit terkecil dari masyarakat bangsa pada umumnya. Konsep ideal relasi kemanusiaan dalam Islam sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam, dalam praktiknya mengalami distorsi sebagai akibat interpretasi terhadap teks keagamaan yang tampak bias gender dengan menampakkan adanya pemihakan terhadap jenis kelamin tertentu dan mensubordinasikan jenis kelamin salah satunya. Pada posisi ini, maka tidak jarang berbagai manifestasi ketidakadilan gender (kekerasan, peminggiran, dan subordinasi) justru lahir karena mendapat justifikasi agama. Relasi gender dalam konteks Islam dibangun melalui institusi hukum yang disebut pernikahan. Konsep perkawinan dalam Islam berada dipersimpangan antara ruang publik dan ruang moral keagamaan. Perkawinan Islam berada diruang sosial (publik), dan juga berada diruang keagamaan karena hak-hak pasangan diperoleh melalui praktik keimanan dan karenanya melalui ketaatan terhadap batasan-batasan yang digariskan Tuhan.

ketidakadilan gender dan relasi personal maupun sosial khususnya dalam lingkup keluarga lahir sebagai hasil dari konstruksi sosial. Sebagai produk kebudayaan, manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga terbentuk oleh banyak variabel seperti sistem budaya, hukum dan keyakinan agama. Oleh karena itu dalam rangka membangun relasi sosial yang adil serta jauh dari aroma kekerasan, perlu dilakukan beberapa langkah kongkrit yaitu:

- a. Kepada pihak pemilik otoritas (pemerintah, tokoh agama, aparat penegak hukum) hendaknya melakukan aksi-aksi bersama untuk melakukan

penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membangun relasi yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Proses pendidikan massa oleh pemerintah dan tokoh agama tentang gender menjadi sangat urgen dan strategis dalam rangka membangun peradaban yang lebih humanis dan egaliter.

- b. Perlunya dilakukan perubahan paradigma pembangunan yang selama ini bersifat monopolik dan tertutup menjadi paradigma pembangunan adil gender di mana setiap warga negara mempunyai akses yang sama baik laki-laki maupun perempuan dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program sekaligus dalam memanfaatkan hasil pembangunan tersebut.
- c. Kepada para tokoh agama (ulama) sebagai kelompok strategis perlu melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang bias gender dengan pola penafsiran baru yang mempertimbangkan aspek kesetaraan gender yang merupakan spirit Islam dengan berpijak pada kearifan lokal.
- d. Agenda penting dalam rangka mengawal program penghapusan dan diskriminasi dan upaya perlindungan terhadap kaum perempuan khususnya praktik kekerasan dalam rumah tangga adalah mendorong kesadaran hukum masyarakat terhadap produk-produk hukum yang sudah ada pada saat yang sama masyarakat juga melakukan kontrol terhadap

aparatus penegak hukum untuk secara konsisten melakukan penegakan hukum sehingga akselerasi penegakan HAM berjalan secara efektif.¹⁶

Dalam penafsiran kekerasan terhadap perempuan tentunya tidak terlepas dari pandangan para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat al-quran, pemikiran yang memunculkan wacana kekerasan terhadap perempuan seharusnya harus dirubah. Legitimasi agama yang dijadikan argumen-argumen pembenaran terhadap kekerasan tersebut, harus ditafsirkan ulang agar teks-teks keagamaan benar-benar dalam ruh kitab suci. Dan masalah perbedaan jenis kelamin dalam kitab suci, harus benar-benar ditempatkan pada posisi dan kedudukannya masing-masing. Serta perlakuan dan pemberian hukum yang berbeda kepada masing-masing jenis kelamin. Dengan konsep kesetaraan gender ini, perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara kodrati dan tradisi serta budaya yang menjadikan posisi dan kedudukan yang timpang. Dengan cara ini pada akhirnya bahwa Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

¹⁶Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka), h. 193-195.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan terhadap perempuan dalam seluruh aspek hubungan antara manusia, yaitu hubungan keluarga dan orang-orang dekat dalam lingkungan sebagai salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika dalam berpakaian, hal tersebut membuat kaum perempuan selalu menjadi sasaran kekerasan dalam lingkungan mereka. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan ditengah masyarakat, serta penjatuhan sanksi yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan.
2. Pandangan hukum Islam tentang kekerasan terhadap perempuan adalah hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari Allah swt, menyandarkan segala ketentuan dari syariat. Serta Islam memandang manusia sama dihadapan Allah, yang membedakan adalah ketakwaan. Pada dasarnya Islam memandang kekerasan adalah jarimah (kriminal) jika seseorang dengan sengaja membuat nyawa seseorang terancam atau melenyapkan nyawa seseorang baik secara fisik dan psikis sebagaimana tindakan tersebut telah diatur dalam hukum Islam.

Dalam Islam, jika seseorang melakukan kekerasan maka harus dikenakan sanksi pidana. Salah satu sanksi pidana yang harus diterima seseorang jika terbukti melakukan kekerasan terhadap seseorang, apabila kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan seperti kekerasan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka dalam hukum Islam tindakan tersebut pelaku akan dikenakan sanksi hukum qishash atau diyat.

B. SARAN

1. Kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih sering terjadi, untuk meminimalisir kekerasan tersebut adalah peningkatan pendidikan serta keterampilan bagi kaum perempuan. Dengan pendidikan serta keterampilan yang dimiliki, maka perempuan mempunyai peluang untuk mendapatkan posisi yang lebih baik terkhusus dalam dunia kerja serta dalam lingkungan masyarakat.
2. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan positif, dengan cara tersebut perempuan mempunyai peluang untuk berinteraksi dengan masyarakat yang berada dalam lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan kerjanya.
3. Sebaiknya perempuan menghindari tempat atau lingkungan yang dianggap bisa membahayakan dirinya sendiri.
4. Perlunya dilakukan perubahan paradigma mengenai posisi perempuan dalam masyarakat serta dalam rumah tangga, posisi perempuan yang dianggap makhluk lemah dan selalu menjadi objek kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Arani. (ed), *Tubuh Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: Rahima, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Asni. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2012.
- Azizy, Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Umum*. Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Al-Baqi Randum, Abd. Khatar Al-Tabarruj wa Al-Ikbtalat. Cet. VIII; Beirut: Muassasat Al-Risalah, 1992.
- Amalia, Mia. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural". *Wawasan Hukum*, no. 25 (02 September 2011).
- Ali, Zinuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak dimata hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Din Wahid dan Jamhari Makruf (editor). *Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2007.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Diperoleh dari halaman <http://seputarpendidikan003.blogspot.co.id/2015/12/>.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Cet. I; Yogyakarta: libery, 1988.
- Diperoleh dari halaman <http://rinawssuriyani.blogspot.com/2013/04/pengertian-metode-dan-metodologi.html>.
- El Saadawi, Nawal, *Perempuan Dalam Budaya Patriarhi*. terj. Zulhimiyasri Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Fakih, Mansur. *Posisi Kaum Perempuan Dalam Analisis Gender Islam Tinjauan*. Cet. I; Yogyakarta: YMI, 1999.
- F.mas'udi, Masdar. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1997.
- Fakih, Mansour. *Kekerasan Gender dalam pembanguna*. Cet. I; Jakarta: Grasido, 2000.
- Fauziah, Syarifah. *Kesetaraan Dan Keadilan Jender Dalam Tafsir Al-Maraghi*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Fayumi, Badriah. *Keadilan dan Kesetaraan Jender dalam Perspektif Islam*. Cet. I; Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

- Harkristuti Harkrismono. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap perempuan*. Jakarta: KKCW-PKWI, UI, 1992.
- Haq, Hamka. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*. Cet. I; Makassar: Yayasan Al-Akham, 2003.
- Harjoko, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hakeem, Ali Hoesin. *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama Membela*. Cet. I; Jakarta: AL-HUDA, 2005.
- Halimah B. *Perempuan Dalam Tafsir Modern*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Hadiati Soeroso, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Jubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Kowani. *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Cet. XI; Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Qur'an, 2009.
- Luhulimo, Achil Sudiarto. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: UUI Press Indonesia, 1999.
- Marlia, Milda. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Mulia, Sitti Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia konsep dan Implementasi*. Cet. I; Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Maloko, M Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Nauscha, Achmad Masruch. *Kaum Wanita Dalam Pembelaan Islam*. Cet. I; Semarang: CV Toha Putra, 1983.
- Nasution, Harun dan Bahtiar Efendi. *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

- Nathalie Collaman. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Program Seri Lokakarya Kesehatan Perempuan. Jakarta: YLKI & The Ford Foundation, 1998.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Cet. I; Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Noor Huda, Noer. *Wawasan al-Qur'an Tentang Perempuan*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Rahman, Abdul. *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*. Makassar: Alauddin Universitypress, 2012.
- Rahmat, Imdadun. *Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Cet. III; Jakarta: Erlangga, 2003.
- Rahman, Abdul. *Perempuan Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Savitri, Niken. *Perspektif Gender Dalam Peradilan, beberapa kasus*. Convention Watch-PKWJ UI Jakarta, 2006.
- Soewondo, Nani. Ny. *Segi-segi Hukum Wanita dalam Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Bina Cipta, 1981.
- Sumarni Salyo, *Beberapa Pemikiran tentang Penyempurnaan Ketentuan-ketentuan Hukum yang Mempengaruhi Peranan dan Kedudukan Wanita di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1999.
- Sastrawati, Nila. *Laki-Laki dan Perempuan Identitas Yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Subhan, Zaitunah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press 2005.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Agusman Hidayat, NIM: 10300111005, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "*Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam*" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 7 September 2016

Pembimbing I



Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi
Nip. 1963122331 199503 1 006

Pembimbing II



DR. Kurniati, S.Ag. M.Hi
Nip. 19740627 200604 2 002

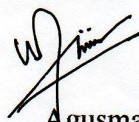
PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: 1634/HPK/2016

Judul Skripsi: Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam

Samata, 25 Juli 2016

Penyusun,



Agusman Hidayat

Nim. 10300111005

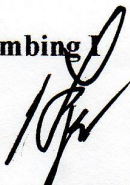
Pembimbing II



DR. Kurniati, S.Ag M.Hi

Nip. 19740627 200604 2 002

Pembimbing I

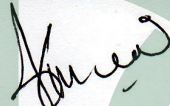


Dr. M. Thanir Maloko, M.Hi

Nip. 196312331 199503 1 006

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan HPK



Dra. Nila Sastrawati, M.Si

Nip. 197107121997032002

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

Nip. 19621016 199003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 788 /SI.1/P.P.00.9/ 6 /2017
Sifat : Penting
Lamp :
Hal : **UNDANGAN MUNAQASYAH**

Samata, 14 Juni 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Dr. Hamsir, M.Hum. (Sekertaris)
 3. Dra. Nila Sastrawati, M.Si. (Penguji I)
 4. Dr. Hj. Rahmatiah HL., M.Pd. (Penguji II)
 5. Dr. M. Thahir Maloko, M.HI. (Pembimbing I)
 6. Dr. Kurniati, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Agusman Hidayat
N I M : 10300111005
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/i) pada Ujian Munaqasyah, Insha Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Juni 2017
Buka Sidang : 08.30 WITA
Waktu : Pukul 9.00 – 10.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 519 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi **H P K** tanggal 17 Mei 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juntamente Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keenam** : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 17 Mei 2017
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 788 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Agusman Hidayat
NIM : 10300111005
Jurusan : Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan
Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Juni 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahkan tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 dan Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum.
Penguji I : Dra. Nila Sastrawati, M.Si.
Penguji II : Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd.
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 14 Juni 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 39 TAHUN 2017

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
TENTANG

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI				PELAKSANA KETUA/SEKANG.
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKDU/IS	MKKP		
01	02	03	04	05	06	
1	Muh. Amin 10300111036	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	Dr. Achmad Musyahid, M.Ag	Dr. Jumadi, S. H. M.H	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Mujahidah, SE Nurhayati Wahid	
2	Agusman Hidayat 10300111005	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	Dr. Nur Taufik Sanusi, M.Ag	Dr. Fatmawati Hilal, M.Ag	Dr. Hansir, M.Hum Dra. Andi Masriah Nurjannah	

Semata, 17 Mei 2017
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
19621016 199003 1003

RIWAYAT HIDUP



Agusman hidayat lahir Di Balangnipa pada tanggal 31 Agustus 1993. Anak ke-Dua dari Empat bersaudara dan merupakan buah cinta dari suami istri antara Ramlin dan Satriani. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 sinjai tahun 1998, ditahun 2001 penulis berhasil lolos dan bergabung dengan kelas unggulan tingkat sekolah dasar Se-Kabupaten Sinjai, dan tamat pada tahun 2005 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN. 3 Sinjai dan tamat di SMPN 1 pulau Sembilan pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Bulupoddo dan tamat pada tahun 2011.

Kemudian di tahun yang sama penulis lulus pada jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum program strata satu (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Pada tahun 2012 penulis menjadi salah satu pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan lalu pada tahun yang

sama penulis juga bergabung dengan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya Komisariat fakultas syariah dan hukum. Pada tahun berikutnya 2012 penulis bergabung dengan organisasi kedaerah KKMS (kerukunan keluarga mahasiswa sinjai) UIN Alauddin Makassar, lalu pada tahun yang sama penulis bergabung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Budaya eSA, dan ditahun 2013 penulis menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

